

LAMPUNG SAI

VOLUME 1 2022

Dirjen AHU Berikan Penguatan

Kepada Divisi Pelayanan Hukum
dan HAM Kanwil Kemenkumham
Lampung



Hari Bhakti Imigrasi Ke-72

Kemenkumham Komitmen
Tingkatkan Layanan Publik
dengan Luncurkan M-Paspor

2022 Sebagai Tahun Hak Cipta

Kanwil Kemenkumham
Lampung Gelar Promosi dan
Diseminasi Hak Cipta

Edi Kurniadi Resmi Jabat Kakanwil Kemenkumham Lampung



5 PESAN MENKUMHAM

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.



- 1 **Utamakan Akuntabilitas
kedepankan Integritas**
- 2 **Bangun Sinergitas serta
manajemen organisasi
yang sehat dan cerdas**
- 3 **Jabatan adalah amanah,
terima dengan tanggung-
jawab dan tinggalkan
jejak yang baik**
- 4 **Kuasai pengelolaan dan
penggunaan anggaran
sesuai prinsip akunta-
bilitas dan transparansi**
- 5 **Perkuat sinergi dan
kolaborasi internal serta
bangun kerjasama tim
yang baik**

**# bangga
melayani
bangsa**

KAMI ASN KEMENKUMHAM
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI

➤ Berorientasi Pelayanan

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Ramah, Cekatan, Solutif dan dapat Diandalkan.
3. Melakukan perbaikan tiada henti.

➤ Akuntabel

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

➤ Kompeten

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

➤ Harmonis

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

➤ Loyal

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi & Negara.
3. Menjaga Rahasia jabatan & negara.

➤ Adaptif

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
2. Terus berinovasi & mengembangkan kreativitas.
3. Bertindak proaktif.

➤ Kolaboratif

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan Pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

Dari Redaksi

Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Buletin Lampung Sai kini terbit per triwulan setiap tahunnya. Pada Volume I Tahun 2022 ini kami telah merangkum kegiatan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dan Unit Pelaksana Teknis selama tiga bulan terakhir.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama dan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan.

Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat kesalahan tulisan. Semangat pembaharuan akan selalu mengiringi langkah tim redaksi untuk terus melakukan inovasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan selalu kami terima dengan sambutan hangat agar E-Buletin Lampung Sai semakin baik dan semakin PASTI. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!



Diterbitkan oleh: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung | **Pelindung:** Kepala Kantor Wilayah | **Pengarah:** Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian | **Penanggung Jawab:** Kepala Bagian Program dan Humas | **Pemimpin Redaksi:** Kepala Sub Bagian Humas RB & TI | **Tim Redaksi dan Redaktur Foto :** Damba Wiratama, Reza Khairulfitra, Pijar P. Arinda, Rizqi D. Wardhanik, Nabil An Nafis | **Desain Grafis dan Layout:** Nabil An Nafis

Daftar Isi



Liputan Khusus



10

Kanwil Kemenkumham Lampung, Gelar Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2022



20

HBI Ke-72 Kemenkumham Komitmen Tingkatkan Layanan Publik dengan Luncurkan M-Paspor



46

Penguatan Dirjen AHU Kepada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung



43

Edi Kurniadi Resmi Jabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung



57

Kakanwil Kemenkumham Lampung Pererat Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum



60

Gelar Rakor Timpora, Kanwil Kemenkumham Lampung Tingkatkan Koordinasi dan Sinergitas dalam Pengawasan Orang Asing



63

Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Promosi dan Diseminasi Hak Cipta

8

Gubernur Lampung Terima Penghargaan Menkumham atas Program Vaksinasi Covid-19 WBP/ASN di Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung



14

Kunjungi Lapas Perempuan Bandar Lampung, Walikota Bandar Lampung Resmikan Sarana Asimilasi dan Edukasi

16

Plt. Kakanwil Resmi Membuka Training HAM Bagi Petugas Unit Layanan Disabilitas di Wilayah Kanwil Kemenkumham Lampung



18

HUT PIPAS ke-18, PIPAS Lampung Gelar Kunjungan Kasih Ke LPKA



19

Tingkatkan Keterampilan WBP Lapas Kelas I Bandar Lampung, Walikota Bandar Lampung Berikan Alat Pembidang Tapis

23

Berlangsung Khidmat, Plt. Kakanwil Lampung Pimpin Pengambilan Sumpah 174 PNS Kemenkumham Lampung

25

Pertajam Penyusunan LKIP 2021, Kanwil Kemenkumham Lampung Minta Pendampingan dari Tim Biro Perencanaan dan Itjen

27

"IKPA Awards" oleh DJPb Lampung, Kanwil Kemenkumham Lampung Raih Terbaik Kedua Capaian Nilai IKPA TA 2021

28

Kanwil Kemenkumham Lampung Berikan Pembekalan Keimigrasian Bagi Personel Yonif 143/TWEJ Persiapan Satgas Pamtas RI-PNG Tahun 2022

30

Rapat Perdana di Tahun 2022, MPWN Provinsi Lampung Bahas 3 (tiga) Permasalahan dari MPDN Kota Bandar Lampung



31

Menkumham Tegaskan RUU Hukum Acara Perdata untuk Percepat Penyelesaian Perkara dan Berbiaya Ringan

34

Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Pengamatan Wilayah Terhadap Potensi Pelanggaran KI Kab. Tulang Bawang

35

OBH Terakreditasi dan Terverifikasi, Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan Bantuan Hukum TA. 2022

37

Kanwil Kemenkumham Lampung Koordinasi Ke Polres Tubabar Terkait Pelanggaran Kekayaan Intelektual

38

Pantau Mutu Layanan, Kanwil Lampung Adakan Monitoring dan Evaluasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti-Korupsi



Kabar Satker



Pengayoman 1

40

Taat Pelaksanaan Administrasi Anggaran, Kantor Wilayah Lampung Gelar Rapat Pembahasan Implementasi Aplikasi SAKTI

50

Bupati Lampung Tengah Terima Audiensi Kakanwil Kemenkumham Lampung Beserta Rombongan

52

Tingginya Kesadaran Hukum Sangat Mendukung Iklim Investasi

55

Ajukan kenaikan kelas kanim Kelas III Non TPI Kotabumi, Tim Kelembagaan Roren Lakukan Peninjauan Langsung dan Validasi Data

66

Bertemu Menteri Kehakiman Filipina, Yasonna Laoly Tegaskan Perlindungan Warga Terdaftar Indonesia dan Penguatan Kerja Sama Hukum



72

Kunjungi Lapas Metro, Kepala Kantor Wilayah Lampung Tinjau Langsung Kegiatan Kerja dan Industri Unggulan



74

Kadiv Pemasarakatan Pimpin Proses Pemindahan 9 Narapidana ke Lapas di Wilayah Nusakambangan

76

Perkuat Kapasitas Notaris Awasi Pencucian Uang, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Audit Kepatuhan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

79

Sukseskan Penilaian KKP HAM Tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Koordinasi



81

Kakanwil Kemenkumham Lampung Tinjau Langsung Vaksinasi Booster WBP Lapas Perempuan



83

Kepala Kantor Wilayah Lampung Resmi Membuka Turnamen Futsal dan Lomba Karaoke di Lapas Gunung Sugih

85

Kanwil Kemenkumham Lampung Sambut Hangat Audiensi dan Kerjasama Universitas Malahayati Lampung



87

Hadiri Sertijab dan Pisah Sambut Kalapas Kotabumi, Kepala Kantor Wilayah Lampung Berpesan untuk Membina Warga Binaan dengan Memanusiakan Manusia



89

Kekayaan Intelktual Lampung, Kenali dan Lindungi



92

Konsep Penta Helix dalam Pengawasan Orang Asing di Indonesia



Kamu Harus Tahu



Karya Pikir

Gubernur Lampung Terima Penghargaan Menkumham atas Program Vaksinasi Covid-19 WBP/ASN di Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung

11/01



Terus menjaga hubungan baik serta sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melakukan Audiensi ke Mahan Agung, Kediaman Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi pada Selasa (11/01/2022). Kegiatan ini juga sekaligus memberikan

Piagam Penghargaan di Hari Dharma Karya Dika Tahun 2021 yang diberikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepada Gubernur Lampung atas bantuan dan dukungannya dalam program vaksinasi dan penanganan Covid-19 bagi ASN/WBP di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto, Kepala Bagian Umum, Hadiyanto, dan Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Imam Santoso juga turut memperbincangkan dengan tugas dan fungsi



”

Iwan Santoso juga berharap kedepannya Gubernur Lampung dapat terus memberikan dukungannya terhadap Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung guna menciptakan pelayanan Publik yang lebih baik

◀ Gubernur Lampung menyambut jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung

yang berkaitan antara Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Provinsi Lampung. Turut Hadir Para Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Lampung. Sebelumnya, Iwan Santoso mengucapkan terima kasih atas dukungan dan peran

serta Pemerintah Provinsi Lampung atas segala bantuan kinerja di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung khususnya di lapas/rutan.

Arinal Djunaidi memberikan sinyal baik bahwa jajarannya akan siap membantu Kementerian Hukum dan HAM Lampung, baik di lapas maupun rutan juga dengan imigrasi dan pelayananan Hukum

dan HAM. Arinal juga berpesan untuk Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung untuk selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung guna mendukung program-program kerja yang dapat membuat Lampung Berjaya. •





DEKLARASI JANJI KINERJA DAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

Menuju WBK/WBBM Tahun 2022

12/02



Bertemakan “Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural”, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Bersih Birokrasi dan Melayani (WBBM) Tahun 2022. Rabu (12/01/2022)





◀ Peserta mengikuti pembacaan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022



◀ Plt. Kakanwil Iwan Santoso menandatangani Pakta Integritas secara digital

Mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPI-DA) Provinsi Lampung, Hadir dalam acara secara langsung, Wakil Gubernur Lampung: Chusnunia Chalim, Kepala Kepolisian Daerah Lampung: Hendro Sugiatno, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung: Heffinur, Komandan Korem Gatam/043: Drajad Brima Yoga, Kepala BIN Daerah Lampung: Iwan Satriawan, Kepala BNNP Lampung: Edi Swasono, Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung: Nur Rakhman Yusuf, Perwakilan Ketua Pengadilan Tinggi

Tanjung Karang, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Wilayah Lampung. Sedangkan hadir secara Virtual Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional Tertentu serta Para Pelaksana melalui Virtual Zoom Meeting dan Live Streaming.

Mengawali Rangkaian Kegiatan, Acara dimulai dengan persembahan Tari "Sigeih Pengunten" dari Warga Binaan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bandar Lampung yang dilanjutkan dengan Pembacaan Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen

Bersama Janji Kinerja, Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Pakta Integritas Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah kepada Pimpinan Tinggi Pratama dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Jaringan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Kegiatan dilanjutkan dengan Pemberian Cinderamata dan Foto bersama, Penayangan Video Pencapaian Kinerja dan Satuan kerja Peraih Predikat WBK Tahun 2021. Memberikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Plt. Kepala Kantor

Wilayah, Iwan Santoso menyampaikan bahwa dengan pelaksanaan Kegiatan ini, Jaringan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berkomitmen untuk membangun SDM unggul dan terpercaya yang menjadikan kata kunci keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan publik.

Iwan juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh FORKOPIMDA Provinsi Lampung yang selama ini telah memberikan dukungan, semoga kedepannya ikatan sinergi tetap terjalin dan semakin erat.

Selanjutnya, Memberikan sambutan, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim menyampaikan bahwa banyak ditemukan persoalan hukum yang ada di masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Lampung per-

lu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Nunik panggilan akrab Ibu Wakil Gubernur, Chusnunia Chalim berharap dengan pelaksanaan kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi para pihak dalam mengembangkan tugas dan fungsi masing-masing demi menciptakan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat luas.

”

Kanwil Kemenkumham Lampung mampu berperan yang maksimal dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

ujar Chusnunia

Acara ditutup dengan penyematan Pin WBK oleh Wakil Gubernur Lampung dan Plt. Kepala Kantor Wilayah kepada Satuan Kerja peraih Predikat WBK Tahun 2021 dan ramah tamah.

◀ Wagub Lampung, Chusnunia mengapresiasi kinerja Kanwil Kemenkumham Lampung





Kunjungi Lapas Perempuan Bandar Lampung, Walikota Bandar Lampung Resmikan Sarana Asimilasi dan Edukasi

13/01



Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana didampingi oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Iwan Santoso dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Putranti Rahayu resmikan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung pada hari ini, Kamis (13/01/2022). Selain meresmikan SAE, Walikota Bandar Lampung bersama dengan Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung juga meninjau langsung rumah pelatihan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan memanen langsung hasil kebun sayur oleh WBP.

Kepala Dinas Perindustrian, Adiansyah serta Kepala UPT Pemasyarakatan di Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung. Walikota Bandar Lampung dalam kesempatan ini juga melihat secara langsung aktifitas keterampilan WBP seperti merajut, menjahit, membuat kue, dan lain sebagainya hingga memborong hasil kerajinan tangan WBP.

Dalam sambutannya, Walikota Bandar Lampung juga menyampaikan bahwa akan memberikan bantuan sebesar 150 juta rupiah kepada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Bantuan ini diharapkan dapat digunakan secara maksimal untuk keperluan Lapas dan mendukung peningkatan hasil karya WBP. Selain itu, Walikota Bandar Lampung juga akan memberikan bantuan berupa 10 alat produksi pembuatan Kain Tapis. Menanggapi hal ini, Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung pada sambutannya menyampaikan apresiasi

dari kiri ke kanan:
Kalapas Perempuan Bandar Lampung, Putranti Rahayu;
Walikota Bandar Lampung,
Eva Dwiana; Plt. Kakanwil
Kemenkumham Lampung,
Iwan Santoso



dan terimakasih kepada Walikota Bandar Lampung yang telah berkenan mengunjungi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dan telah memberikan bantuan. "Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih atas bantuan yang Ibu berikan, ini merupakan bentuk kolaborasi yang luar biasa antara Kanwil Kemenkumham Lampung bersama Pemkot Bandar Lampung. Semoga kedepannya Kolaborasi antar lembaga seperti ini dapat terus berlangsung." Ujar Iwan.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Diharapkan kerjasama dan sinergitas lembaga ini akan terus berlanjut sehingga bersama - sama dapat saling mendukung dalam meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan. •

”

Perjuangan wanita memang tidak mudah, terus bersabar, tetap semangat dan jangan berputus asa. Keterampilan yang telah dipelajari di dalam Lapas bisa digunakan sebagai bekal nanti setelah keluar Lapas, terus berkarya dan jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT yang Maha Penolong dan tidak pernah meninggalkan kita disaat sedang terpuruk. Saya terharu melihat perjuangan para WBP

ucap Eva Dwiana



◀ Eva Dwiana, resmikan Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Perempuan Bandar Lampung



▲ Walikota Bandar Lampung bersama dengan Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung meninjau rumah pelatihan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Plt. Kakanwil Resmi Membuka Training HAM Bagi Petugas Unit Layanan Disabilitas di Wilayah Kanwil Kemenkumham Lampung

20/01



Berlangsung di Hotel Emersia Bandar Lampung, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Iwan Santoso membuka secara resmi Training Hak Asasi Manusia bagi Petugas Unit Layanan Disabilitas di Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada hari ini, Kamis (20/01/2022). Kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Direktur Jenderal Pemasarakan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 September 2020 lalu yang melegalisasi Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020 tentang Pem-



▲ Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Ditjen Pemasarakan didukung oleh The Asia Foundation dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

”

"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PUSHAM UII yang telah menjadikan Kanwil Kemenkumham Lampung sebagai salah satu pilot project Unit Layanan Disabilitas (setelah berhasil melembagakan ULD di Provinsi D.I.Yogyakarta pada tahun 2019 dan 2020)"

ujar Iwan



bentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasaryakatan di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) dan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia didukung oleh The Asia Foundation dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung pada sambutannya menyampaikan bahwa Tahanan, Narapidana dan Anak Penyandang Disabilitas, juga berhak mendapatkan pelayanan dan perawatan yang setara dan berkeadilan de-

ngan menghilangkan semua hambatan pada setiap bisnis proses. Selain itu, Iwan Santoso juga memberikan apresiasi kepada PUSHAM UII dan menyampaikan bahwa pelatihan ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai disabilitas dari berbagai perspektifnya, yaitu: mencakup paradigma penyandang disabilitas, sarana dan prasarana aksesibel, dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Kegiatan yang diselenggarakan dari Kamis (20/01/2022) hingga Sabtu (22/01/2022) datang ini dihadiri oleh perwakilan staf ULD dari masing-masing UPT yaitu Lapas Kelas I Bandar Lampung, Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, LPP Kelas IIA Bandar Lampung, Lembaga Pen-

didikan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung, Rutan Kelas I Bandar Lampung, dan Balai Pemasaryakatan Kelas II Bandar Lampung. Selain itu, juga mengundang perwakilan dari Dit Watkes Rehab Ditjen PAS untuk mengikuti kegiatan via zoom.

Mendatangkan Narasumber Penggiat dan Aktivist Difabel, Cucu Saidah; Direktur Pusham UII, Eko Riyadi; dan Pusham UII, Despan Heryansyah kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Staf ULD mengenai paradigma penyandang disabilitas, sarana dan prasarana aksesibel, etika berinteraksi terhadap penyandang disabilitas, serta meningkatkan aksesibilitas pelayanan UPT Pemasaryakatan bagi penyandang disabilitas. •



HUT PIPAS ke-18, PIPAS Lampung Gelar Kunjungan Kasih Ke LPKA

20/01



penyerahan bantuan berupa mesin bordir dan perlengkapan mandi kepada pihak LPKA oleh PIPAS Lampung



Terimakasih kepada seluruh Kepala UPT Pemasarakatan yang selama ini telah mendukung kegiatan PIPAS.

ucap Wiwiek

Dalam rangka memeringati Hari Ulang Tahun Paguyuban Ibu-ibu Pemasarakatan (PIPAS) Ke -18 yang jatuh pada Senin (24/01/2022) mendatang, PIPAS Lampung Gelar Kunjungan Kasih ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung pada hari ini, Kamis (20/01/2022). Kegiatan ini digelar sesuai dengan arahan dari Ibu PIPAS PUSAT untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan peringatan antara lain Webinar dengan tema "Peran Ibu Dalam Peningkatan Kesehatan Mental Keluarga di Masa Pandemi Covid-19" serta Kunjungan Kasih Serentak ke LPKA atau LPP.

Bertempat di Ruang Aula Kunjungan LPKA Kelas II Bandar Lampung, hadir langsung Ketua PIPAS Lampung, Wiwiek didampingi oleh jajaran pengurus dan anggota

PIPAS Lampung diikuti anggota PIPAS dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung disambut langsung oleh Kepala LPKA Kelas II Bandar Lampung, Sambiyono bersama dengan pegawai LPKA.

Dalam sambutannya Kepala LPKA menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari ibu-ibu PIPAS Lampung kepada LPKA Kelas II Bandar Lampung dan ABH. Menyambut hal ini, Ketua PIPAS Lampung juga memberikan nasehat kepada ABH /Anak didik yang berada dalam LPKA untuk tetap menjalankan pembinaannya di LPKA dengan taat beribadah agar kelak setelah keluar dari LPKA tidak melanggar hukum kembali dan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Wiwiek juga menyam-

paikan apresiasi kepada anggota yang telah menyempatkan hadir memeriahkan acara ini ditengah kesibukan yang lain.

Acara ditutup dengan penyerahan bantuan berupa mesin bordir dan perlengkapan mandi kepada pihak LPKA dengan harapan agar barang-barang yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi ABH /Anak Didik yang berada di LPKA. Selain itu, dengan terselenggaranya kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar anggota PIPAS Lampung.

Tingkatkan Keterampilan WBP Lapas Kelas I Bandar Lampung, Walikota Bandar Lampung Berikan Alat Pembedang Tapis

21/01



Berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung, Walikota Bandar Lampung yang akrab disapa Bunda Eva menyerahkan Bantuan Sarana Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas I Bandar Lampung. Senin (21/01/2022) Hal ini merupakan sebagai bentuk upaya meningkatkan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Bandar Lampung.

Bunda Eva mengunjungi Lapas dengan didampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM serta Kepala Dinas Kominfo menyerahkan secara langsung kepada Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Maizar berupa 10 Alat pembedang Tapis dan 3 (tiga) buah mesin border. Dalam sambutan yang diberikan, Bunda Eva berharap keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat terus terasah. "Semoga dengan bantuan ini bisa memberikan dan meningkatkan daya kreatifitas Narapidana untuk memiliki skill atau keahlian dan berguna sebagai bekal ketika nanti mereka bebas" ujar Bunda Eva.

Plt. Kepala Divisi Administrasi, Nur Ichwan yang mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya kepada Walikota Bandar Lampung karena telah peduli dengan kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lingkungan Lapas Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung. Nur Ichwan berharap sinergitas yang ada antara Kanwil Kemenkumham Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat terjalin dengan baik.

Selanjutnya, Maizar dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan untuk warga binaan, "kami sangat berterima kasih atas pemberian Alat Pembedang Tapis dan Alat bordir, semoga dapat digunakan dan bermanfaat bagi mereka". Pungkas Maizar selaku Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung.



Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana (jilbab merah) berikan pembedang tapis kepada Lapas Kelas I Bandar Lampung



Semoga dengan bantuan ini bisa memberikan dan meningkatkan daya kreatifitas Narapidana untuk memiliki skill atau keahlian dan berguna sebagai bekal ketika nanti mereka bebas

ucap Eva Dwiana

Peringati HBI ke-72, Kemenkumham Komitmen Tingkatkan Layanan Publik dengan Luncurkan M-Paspor

27/01



Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengingatkan para insan Imigrasi untuk selalu menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang negara. Hal tersebut disampaikan Yasonna dalam amanatnya sebagai Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-72 yang digelar secara hybrid di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis (27/01/2022).

“Jangan sampai ada oknum Imigrasi yang melakukan kesalahan dan lengah dalam melakukan pengawasan keimigrasian. Tindakan seperti itu tidak dapat ditolerir karena akan menurunkan kepercayaan publik”, ujar Yasonna.

Menkumham menekankan untuk mengedepankan tata nilai PASTI dalam bekerja. Seluruh jajaran Imigrasi, kata Yasonna, harus disiplin dan taat asas, bersemangat melayani masyarakat dengan lebih baik, tanpa pamrih, dan optimal.

“Sebagai ASN, jajaran Imigrasi harus ingat posisi sebagai pelayan masyarakat. Jangan eksklusif, jangan minta dilayani, dan biasakan hidup sederhana,” sambung Menkumham

Sejalan dengan komitmen pemerintah yang gencar melakukan akselerasi transformasi digital di berbagai bidang, Ditjen Imigrasi meluncurkan dua aplikasi terbaru, yakni Aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) serta Aplikasi Cegah dan Tangkal (Cekal) Online pada Peringatan Hari Bhakti Imigrasi yang ke-72.

Aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) memulai debutnya dengan uji coba di tiga Kantor Imigrasi, yaitu Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, dan Kantor Imigrasi Tangerang. Tepat pada puncak HBI ke-72, M-Paspor resmi menggantikan pendahulunya, Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO). Melalui M-Paspor, pemohon dapat mengajukan permohonan paspor dengan mengunggah scan berkas ke aplikasi. Dengan demikian, pe-



”

Usia 72 tahun mencerminkan tingkat kematangan baik dalam organisasi maupun dalam hal berkinerja. Dalam usia ini kita tidak boleh lagi salah dalam mengambil kebijakan dan keputusan, segala pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian harus benar-benar kita lakukan dengan Semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif)

ujar Yasonna

mohon cukup menunjukkan berkas aslinya saat wawancara di Kantor Imigrasi sehingga memangkas waktu tatap muka. Fitur-fitur unggulan M-Paspor antara lain Pembayaran PNBP di Awal, Cek Status Permohonan Paspor, Validasi NIK Dukcapil, Reschedule Jadwal Kedatangan dan Integrasi Dokumen Perjalanan RI.

Adapun Cekal Online diluncurkan untuk menguatkan pengawasan dan penegakan hukum. Cekal Online akan terintegrasi dengan



▲ Kakanwil, Iwan Santoso bersama jajaran Imigrasi mengikuti jalannya upacara Hari Bhakti Imigrasi Ke-72 secara virtual di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung

platform layanan keimigrasian lainnya untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi subjek yang dikenakan pencegahan/penangkalan.

Saat ini, tengah dikembangkan teknologi Elastic Search, yaitu pencarian/pencocokan identitas akan dimasukkan ke dalam logika aplikasi Visa Online untuk melihat data perlintasan keimigrasian. Selain itu terdapat teknologi Matching By Biometric guna meminimalisasi pemalsuan data keimigrasian.

Pada usianya yang ke-72, Ditjen Imigrasi terus meningkatkan daya saing perekonomian serta mendorong kemudahan izin berusaha (easy of doing business) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, revitalisasi penegakan hukum dan keamanan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional. •



◀ Aplikasi M Paspor pengganti Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO)



▲
Scan QR Code di atas untuk
mengunduh aplikasi M-Paspor



Sepanjang tahun 2021, Imigrasi menyumbangkan penghasilan Negara sebesar Rp. 1.421.429.862.486,- dari sektor non pajak (PNBP). Jumlah tersebut naik 6,16% dibandingkan tahun 2020, meski masih berada dalam situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan signifikan dari statistik layanan Keimigrasian tahun 2021.

Berlangsung Khidmat, Plt. Kakanwil Lampung Pimpin Pengambilan Sumpah 174 PNS Kemenkumham Lampung

27/01



Berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, 174 CPNS telah sah mengambil sumpah menjadi PNS yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung pada hari ini, Kamis (27/01/2022). Pengambilan sumpah ini diselenggarakan secara langsung di Kantor Wilayah bagi yang bertugas di wilayah Bandar Lampung

dan secara online melalui aplikasi zoom untuk yang bertugas diluar Wilayah Bandar Lampung.

Kegiatan diawali dengan pengambilan sumpah PNS yang dipimpin oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso dan diikuti oleh 174 pegawai yang sebelumnya telah menjalankan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri selama 1 (satu) tahun. Acara dilanjutkan dengan penyematan pangkat kepada perwakilan PNS yang telah diambil sumpahnya.

Pada kesempatan ini, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sejalan dengan tuntutan publik akan kinerja Aparatur Pemerintah yang lebih profesional, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap PNS untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Untuk itu, Iwan Santoso menyampaikan harapannya kepada PNS yang baru diambil sumpah ini

◀ Penyematan tanda pangkat secara simbolis oleh Plt. Kakanwil





”

Saya berpesan kepada Saudara untuk ikut membangun dan menjaga citra positif PNS dengan bekerja sebaik-baiknya, Saudara harus mampu menunjukkan figur PNS yang berkualitas dan profesional

ujar Iwan

untuk bekerja dengan baik dan menerapkan prinsip PASTI. Kegiatan ini dilaksanakan secara khidmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah yang diikuti oleh seluruh Pejabat dan tamu undangan. •



◀ Pengambilan sumpah PNS yang dipimpin oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung



▲ Scan QR Code di atas untuk menonton video pengambilan sumpah PNS di kanal Youtube Kanwil Kemenkumham Lampung



Pertajam Penyusunan LKIP 2021, Kanwil Kemenkumham Lampung Minta Pendampingan dari Tim Biro Perencanaan dan Itjen

03/02 



Demi mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang Semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melakukan pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2021 yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung. (03/02/2022)



Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, tampak hadir Plt. Kepala Divisi Administrasi, Nur Ichwan bersama dengan Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputran-to, Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali serta Pelaksana. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat

 Kabag Program dan Humas Basnamara saat menyampaikan Laporan Kegiatan

sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja pada masing-masing Satuan Kerja.

Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara menyampaikan bahwa kegiatan ini di hadiri oleh 26 orang dari para penyusun LKIP seluruh Jajaran Kantor Wilayah se-Provinsi Lampung terdiri dari 26 Satuan kerja di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, serta di hadiri juga oleh pendamping penyusunan LKIP oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal. Memberikan sambutan, Plt. Kepala Divisi Administrasi, Nur Ichwan menyampaikan bahwa Pada kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan bahwa Penyampaian Laporan Kinerja Ke-

”

Untuk itu, setiap Satuan Kerja diwajibkan membuat laporan kinerja tahunan yang disampaikan oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani Bersama Kepala Kantor Wilayah

ujar Iwan

menterian Hukum dan HAM dari satuan unit kerja sampai dengan Presiden dilakukan melalui mekanisme berjenjang. Acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Widi Sutresna selaku Sub Koordinator Pengawas Pemantauan, Analisis dan Pelaporan I Biro Perencanaan yang menjelaskan bagaimana penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja. Kinerja adalah hasil/kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan laporan kinerja adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi amanah atau mandat. Serta Sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya. •



“IKPA Awards” oleh DJPb Lampung, Kanwil Kemenkumham Lampung Raih Terbaik Kedua Capaian Nilai IKPA TA 2021

08/02 



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Menghadiri Acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan Strategi Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang digelar Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Bandar Lampung. Senin (08/02/2022)

Kegiatan ini turut mengundang Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mitra Kerja KPPN Bandar Lampung. Mengangkat tema “Sinergi dan Penguatan Peran KPPN Bandar Lampung dengan Satuan Kerja dalam Mendorong Percepatan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2022”, Kepala Bagian

Umum Kanwil Kemenkumham Lampung, Hadiyanto bersama dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN, Arya Dwi Jayanti turut menghadiri Kegiatan secara langsung di Aula LPMP Lampung.

Kegiatan dimulai dengan penyampaian Laporan Kegiatan oleh Kepala KPPN Bandar Lampung, Darmawan dan dilanjutkan dengan Keynote speech dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Lampung, M.Dody Facrudin.

Selanjutnya dalam pemberian penghargaan “IKPA Awards”, Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung berhasil mendapatkan penghargaan terbaik kedua capai-

an nilai IKPA tahun anggaran 2021 dimana Penghargaan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Lampung kepada Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Lampung.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan Materi oleh narasumber oleh Lalang Herlana dan Kwatri Sumiyati. Tercapainya penghargaan IKPA Awards yang diberikan oleh DJPb Lampung merupakan hasil kerja keras dari seluruh Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung terkhusus Sub Bagian Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Lampung. •

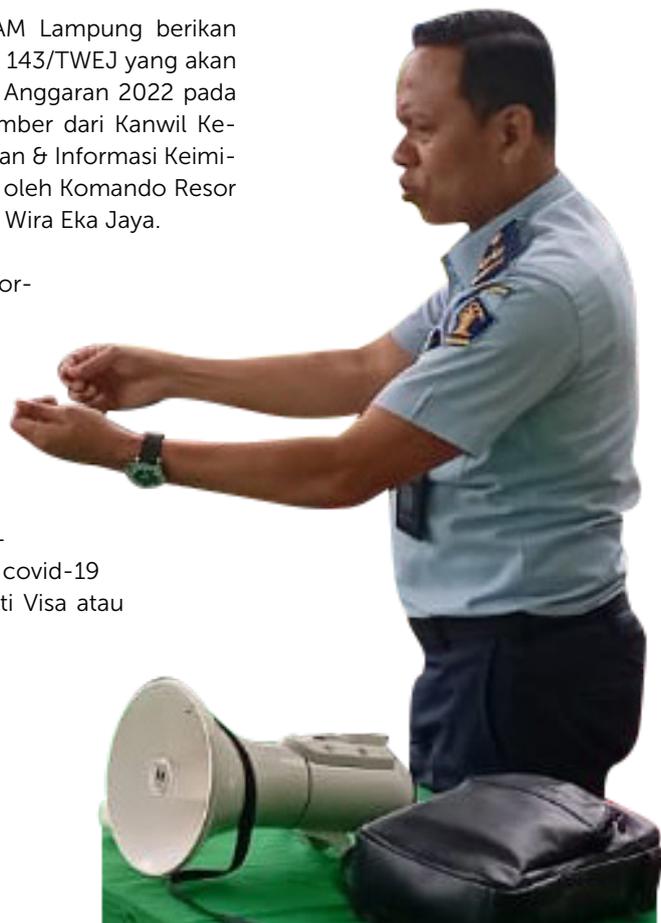
Kanwil Kemenkumham Lampung Berikan Pembekalan Keimigrasian Bagi Personel Yonif 143/TWEJ Persiapan Satgas Pamtas RI-PNG Tahun 2022

09/02 



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berikan pembekalan keimigrasian bagi personel Yonif 143/TWEJ yang akan melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Tahun Anggaran 2022 pada hari ini, Selasa (08/02/2022). Hadir sebagai Narasumber dari Kanwil Kemenkumham Lampung adalah Kepala Bidang Perizinan & Informasi Keimigrasian, Imam Santoso. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam Batalyon Infanteri 143/TRI Wira Eka Jaya.

Pada kesempatan ini, Kabid Perizinan & Informasi Keimigrasian menjelaskan tentang dasar-dasar keimigrasian dan administrasi yang diperlukan untuk melintasi batas kenegaraan. Imam Santoso juga menyampaikan bahwa sesuai dengan Permenkumham No. 34 Tahun 2021 Orang Asing yang tidak memenuhi ketentuan protokol kesehatan dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam masa pandemi covid-19 ini selain memenuhi persyaratan administratif seperti Visa atau





◀ Kepala Bidang Perizinan & Informasi Keimigrasian, Imam Santoso, menjelaskan tentang dasar-dasar keimigrasian dan administrasi yang diperlukan untuk melintasi batas kenegaraan



▶ Peserta kegiatan personel Yonif 143/TWEJ yang akan melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Tahun Anggaran 2022

Izin Tinggal yang sah, Orang Asing yang melewati batas negara Indonesia wajib menunjukkan Hasil RT-PCR Negatif Covid-19, Bukti telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap, surat pernyataan bersedia memenuhi protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia, dan menyerahkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan.

"Pemerintah Indonesia saat ini, masih menghentikan sementara pemberian Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan saat kedatangan sampai dengan Covid-19 dinyatakan berakhir oleh Pemerintah Republik Indonesia" Imbuhnya.

”

Wilayah NKRI memiliki wilayah yang banyak berbatasan langsung dengan negara lain, ini suatu kenyataan yang harus disadari bahwa Indonesia harus senantiasa waspada dalam menjaga wilayah perbatasan.

kolaborasi antar unsur CIQS dan Instansi terkait diperlukan dalam penguatan perbatasan Indonesia, hal ini sesuai dengan Nawacita Ketiga yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama dengan seluruh Instansi terkait berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi untuk terus melaksanakan tugas keimigrasian dengan baik demi menjaga wilayah perbatasan. •

Rapat Perdana di Tahun 2022, MPWN Provinsi Lampung Bahas 3 (tiga) Permasalahan dari MPDN Kota Bandar Lampung

09/02



Bertempat di Ruang Legal Draft Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Lampung menggelar Rapat perdana di Tahun 2022. Rabu (09/02/2022)

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan dan dilanjutkan dengan penyampaian oleh Wakil Ketua MPWN Prov. Lampung, Reza Berawi bahwa Undang-undang Jabatan Notaris yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung harus sesuai dan tertuju pada kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan regulasi, ilmu pengetahuan dan etika yang dijaga. Acara dilanjutkan dengan



Reza berharap Kedepannya Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung agar dapat membuat Langkah-langkah strategis dalam pengawasan notaris-notaris.

membahas Lanjutan Permasalahan yang dilaporkan oleh MPDN Kota Bandar Lampung kepada MPWN Provinsi Lampung terkait

dengan Rangkap Jabatan Notaris, serta hambatan proses serah terima Protokol Notaris yang berada di bawah pengawasan MPDN Kota Bandar Lampung.

Hadir secara langsung dalam Rapat Rutin Bulanan para Anggota MPWN Provinsi Lampung yaitu Puadi Jailaini yang berasal dari Unsur Pemerintahan, Prof. Hamzah, Erina Pane, dan Erlina B. dari unsur Akademisi dan Rizal Effendi serta Reka Rini PH dari unsur Notaris. Tampak seluruh anggota saling bertukar pendapat serta menyampaikan aspirasi terhadap Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh MPWN Provinsi Lampung terkait dengan Laporan dari MPDN Kota Bandar Lampung. •



Menkumham Tegaskan RUU Hukum Acara Perdata untuk Percepat Penyelesaian Perkara dan Berbiaya Ringan

16/02



Jakarta—Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (16/2/2022). Dalam kesempatan itu, Yasonna menyampaikan beberapa poin penambahan dan penguatan dalam rancangan Hukum Acara Perdata.

Yasonna menjelaskan, sebagai penyempurnaan terdapat norma penguatan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu antara lain: pihak-pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan, jangka waktu pengiriman permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi, kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke PN. Kemudian kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke para

pihak, syarat kondisi ketika MA ingin mendengar sendiri para pihak atau para saksi dalam pemeriksaan kasasi, penguatan batas waktu pengiriman berkas perkara PK ke MA, reformulasi pemeriksaan perkara dengan acara singkat, pemeriksaan perkara dengan acara cepat dan reformulasi jenis putusan.

“Penambahan norma yang muncul atas adanya kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, antara lain pemanfaatan teknologi dan informasi dan pemeriksaan perkara dengan

acara cepat,” kata Yasonna, saat membacakan penjelasan Presiden atas RUU tentang Hukum Acara Perdata, di ruang rapat Komisi



Pemanfaatan teknologi dan informasi ini dapat mempersingkat waktu, mempermudah akses, dan data pemanggilan pihak yang berperkara secara otomatis dapat tersimpan dalam sistem informasi





III DPR RI. Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan, pemanfaatan teknologi informasi pada saat pemanggilan pihak yang berperkara dapat dilakukan secara elektronik juga pengumuman penetapan.

“Pemanfaatan teknologi dan informasi ini dapat mempersingkat waktu, mempermudah akses, dan data pemanggilan pihak yang berperkara secara otomatis dapat tersimpan dalam sistem informasi,” ujar Yasonna.

“Ini menjadikan proses pemanggilan lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada perluasan alat bukti yang mengacu pada UU ITE yang telah mengatur keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik

mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah,” sambungnya.

Kemudian terkait pemeriksaan perkara dengan acara cepat, kata Yasonna, sangat penting karena kemudahan berusaha (*ease of doing business*) bukan hanya dipengaruhi regulasi dan perizinan, tetapi juga waktu tunggu yang dihabiskan dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

“Suatu perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara cepat, jika nilai Gugatannya paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah),” ucap Yasonna melanjutkan. Adapun pemeriksaan dengan acara cepat meliputi perkara: utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian, kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian, cedera badan pribadi yang tim-

”

Oleh karena itu dalam RUU Hukum Acara Perdata diatur mengenai pemeriksaan perkara dengan acara cepat. Hal ini sesuai dengan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

bul berdasarkan perjanjian, dan pembatalan perjanjian. Yasonna menuturkan, pemeriksaan perkara dengan acara cepat, pembuktiannya dilakukan dengan cara pembuktian sederhana. Dalam pembuktian sederhana, terhadap dalil gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh tergugat, tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap dalil gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian.

“Pengadilan memutus perkara dengan acara cepat dalam waktu paling lama 30 hari dan Putusan Pengadilan dengan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum apapun,” ungkap Yasonna. Menkumham menegaskan, materi Hukum Acara Perdata akan men-

jangkau hakim, ketua pengadilan, juru sita, panitera, para pihak yang beracara di persidangan perdata, ahli waris, kuasa hukum para pihak, termasuk aparat penegak hukum, maupun masyarakat (termasuk pelaku usaha).

Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata diarahkan untuk mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, terutama dalam hal menyelesaikan sengketa keperdataan para subyek hukum, selain itu juga untuk melindungi hak asasi manusia, mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak asasi dan kewajiban. Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada

dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata peninggalan Kolonial Belanda ada 3 (tiga) jenis: *Burgelijke rechtsvoordering* (Brv) adalah untuk golongan Eropa, *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) adalah untuk golongan Bumiputra wilayah Jawa dan Madura, *Reglement Buitengewesten* (Rbg) adalah untuk golongan Bumiputra wilayah luar Jawa dan luar Madura. Selain itu, masih banyak Peraturan Perundang-undangan produk NKRI termasuk SEMA dan PERMA. •



Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Pengamatan Wilayah Terhadap Potensi Pelanggaran KI Kab. Tulang Bawang

17/02



Dalam rangka Pengamatan Wilayah terhadap potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual Kabupaten Tulang Bawang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan koordinasi ke Kepolisian Resort Tulang Bawang mengenai potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Instansi/mitra/stakeholder terkait.

Bertempat di Kepolisian Resort Tulang Bawang, Tim dari Kanwil Kemenkumham Lampung dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar TS, bersama dengan Penyuluh Hukum Madya, Muhammad Zuhri, Analis Permohonan Kekayaan Intelektual, Nanta Fenomena, dan Pengeloah Bahan Evaluasi dan Pelaporan, Cucuk Wasisatuhu.

Sebagai informasi, Tim Kanwil Kemenkumham Lampung yang melaksanakan koordinasi terdiri dari 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual (KI) yaitu Ignatius Mangantar TS dan Cucuk Wasisatuhu. •



Kegiatan ini juga sebagai bentuk bahwa Kanwil Kemenkumham Lampung memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual, di antaranya melalui fungsi PPNS KI dan sinergitas antar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses penegakan hak kekayaan intelektual.

22 OBH Terakreditasi dan Terverifikasi, Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan Bantuan Hukum TA. 2022

21/02



Senin (21/02/2022) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Kegiatan Penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan bantuan Hukum tahun Anggaran 2022 bersama dengan Organisasi Pemberian bantuan Hukum yang bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung.

Sebanyak 22 Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi dan Terverifikasi antara lain sebagai berikut:

1. YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FIAT YUSTISIA;
2. YLBHI LBH BANDAR LAMPUNG;
3. BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG (BKBH FH UNILA);
4. PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) WILAYAH LAMPUNG;
5. PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN KESEHATAN NEGARA SEMESTA (LBKNS);
6. YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA LAMPUNG;
7. LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENANG JAGAD;
8. POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) ADIN JAKARTA CABANG LAMPUNG;
9. LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA BERSAMA LAMPUNG;
10. POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TANGGAMUS;
11. LEMBAGA ADVOKASI LAMPUNG;
12. POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TULANG BAWANG;
13. LBH ADIL NUSANTARA;
14. LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAKAI SAMBAYAN;
15. POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PESISIR



Mari kita tingkatkan lagi pelaksanaan kegiatan bantuan hukum yang sudah ditetapkan di tahun 2022. Semoga menjadi lebih baik lagi dan Amanah

pungkas Nur Ichwan



◀ Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Kabag Umum menandatangani Kontrak Kerja Pelaksanaan Bantuan Hukum

- BARAT;
- 16. LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAI BUMI SELATAN;
- 17. YAYASAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM LAMPUNG LEMBAGA BANTUAN HUKUM TANJUNG BINTANG;
- 18. LEMBAGA BANTUAN HUKUM TULANG BAWANG BARAT;
- 19. LBH LAMPUNG BARAT;
- 20. LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL;
- 21. PBH PERADI (SECARA MANUAL); dan
- 22. POSBAKUMADIN LAMPUNG TIMUR.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dan pengarahan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum

dan HAM, Nur Ichwan sekaligus membuka kegiatan Penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022. Dalam sambutannya, Iwenk panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya negara dalam memenuhi hak warga negaranya dalam kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

Nur Ichwan juga menjelaskan bahwa secara teknis pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang terdapat dalam Undang-undang Nomor

16 Tahun 2011, tidak dilakukan langsung oleh pemerintah melainkan melalui Organisasi bantuan Hukum.

Sebelum menutup sambutannya, Nur Ichwan menyampaikan bahwa pada intinya realisasi di tahun 2021 menjadi bahan evaluasi bagi kita semua dengan Kerjasama yang professional..•

Kanwil Kemenkumham Lampung Koordinasi Ke Polres Tubabar Terkait Pelanggaran Kekayaan Intelektual

24/02



Dalam rangka Pemantauan dan Pengawasan kekayaan Intelektual di Kabupaten Tulang Bawang barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan koordinasi ke Kepolisian Tulang Bawang Barat. Kamis (24/02/2022)

Tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar TS bersama dengan kepala Subbidang Pelayanan KI, Adil Jaya Negara, Penyuluh Hukum Muda, Erwin Setiawan Yuniato, dan Pengolah Bahan Evaluasi dan Pelaporan, Cucuk Wasiatuhu berkoordinasi

dengan Kepolisian Resort Tulang Bawang Barat terkait tukar informasi tentang laporan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Disambut secara langsung dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal, AKP. Fredy Aprisa Putra Parinda menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim khusus serta menjelaskan bahwa tidak ada laporan tentang pelanggaran KI di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun demikian Tim dari Kanwil Kemenkumham Lampung memberikan sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai dapat terlindungi. •



Diharapkan koordinasi ini sebagai sarana bertukar pikiran dengan Stakeholder yang berinovasi dengan karyanya dan memperoleh hak serta perlindungan dari hasil karyanya tersebut

Pantau Mutu Layanan, Kanwil Lampung Adakan Monitoring dan Evaluasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti-Korupsi

24/02



Untuk mendukung percepatan proses pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melaksanakan Survei Mandiri IPK dan IKM berbasis elektronik (QR code) di setiap satuan kerja. Survei ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mengukur tingkat integritas dalam rangka pemetaan satuan kerja yang berpotensi

untuk diusulkan meraih predikat WBK/WBBM. Menindaklanjuti hal tersebut, pada Kamis (24/02) Kantor Wilayah melakukan pengkajian guna mengidentifikasi dan memverifikasi permasalahan pada satuan kerja. Bertempat di Aula Kantor Wilayah, kegiatan dihadiri langsung oleh Rugun Tresia selaku Plt. Kepala Bidang HAM dan Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, & Pengembangan Hukum & HAM, Susilowati serta mengundang administrator aplikasi Survei 3AS dari masing-masing satuan kerja di Jaringan Kantor Wilayah Lampung.

Guna mengetahui upaya tindak lanjut yang harus dilakukan oleh unit kerja dalam mengatasi permasalahan terkait indikator penilaian survei mandiri IPK dan IKM sehingga dapat diusulkan meraih predikat WBK/WBBM penyelenggaraan pelayanan publik. Kedepannya akan diadakan kunjungan secara langsung oleh tim Kantor Wilayah dalam rangka verifikasi dan intervensi terhadap pelaksanaan layanan publik dan surveinya. Adapun Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ade Arif Firmasyah, S.H., M.H., dihadirkan se-

”

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja terkait indikator penilaian survei mandiri IPK dan IKM sehingga tidak berpotensi untuk diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.



Pt. Kabid HAM, Rugun Pakpahan saat memberikan sambutan kepada peserta

bagai narasumber guna membe-
dah dasar hukum terkait pedoman
pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat dan pedoman pem-
bangunan zona integritas pada
instansi pemerintah. Pembahasan
yang disampaikan Ade member-
ikan perspektif dari sudut pan-
dang keilmuan terkait kuantifikasi
dan analisis data hasil survei serta
penelitian dampaknya terhadap
peningkatan kualitas pelayanan
publik. •



Taat Pelaksanaan Administrasi Anggaran, Kantor Wilayah Lampung Gelar Rapat Pembahasan Implementasi Aplikasi SAKTI

09/02



Hari ini Rabu (09/02), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan giat rapat dan pengarahan terkait pelaksanaan anggaran TA.2022. Kegiatan ini dipimpin oleh Plt.Kepala Divisi Administrasi, Nur Ichwan dengan didampingi Kepala Bagian Umum, Hadiyanto dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN, Arya Dwi Jayanti. Peserta rapat dihadiri oleh para Pejabat Administrator dan Pengawas serta PIC yang ditunjuk setiap Sub Bagian dan Sub Bidang nya yang ditugaskan terkait dengan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan anggaran. Rapat yang dibuka oleh Plt.Kepala Divisi Administrasi, Nur Ichwan ini membahas mengenai perubahan yang terjadi dengan adanya aplikasi pelaksanaan penganggaran ter-

”

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

baru dari Kementerian Keuangan yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (me-

liputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.

3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Selanjutnya, Kasubbag Keuangan dan BMN, Arya Dwi Jayanti menjelaskan SOP dalam pengajuan anggaran pelaksanaan kegiatan, dan SOP dalam pengajuan anggaran perjalanan dinas kepada para peserta rapat. Menutup kegiatan, Kepala Bagian Umum, Hadiyanto berharap de-

ngan diadakannya rapat ini dapat tercipta satu kesepahaman dan komitmen para peserta rapat untuk melaksanakan tahapan-tahapan pengajuan anggaran kegiatan sesuai dengan SOP yang telah dibuat sebaik mungkin sehingga pelaksanaan penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik. •



▲
Kasubag Keuangan dan BMN, Arya Dwi Jayanti menjelaskan SOP pengajuan anggaran





KEMENKUMHA

Da

BAPAK I... WAN SA

Kepa

BAPAK... KURNIA

AS SA



REFO
LIT



EDI KURNIADI Resmi Jabat Kakanwil Kemenkumham Lampung

04/03 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah. Jum'at (11/03/2022) Pelaksanaan Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah antara Iwan Santoso dan Edi Kurniadi dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung yang digelar secara hybrid (langsung dan Virtual Zoom Meeting serta Live Streaming). Kegiatan dihadiri secara virtual oleh Staf Ahli Bidang Sosial Kementerian Hukum dan HAM RI, Min Usi

sebagai saksi dan turut disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung, Pimpinan Wilayah Bank Syariah Indonesia (BSI) Lampung, Pimpinan Wilayah PT. Pegadaian, serta Para Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengikuti secara live streaming melalui kanal Kumham Lampung.

Acara dilaksanakan secara khidmat dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan memori Serah Terima Jabatan dari Iwan Santoso kepada Edi Kurniadi serta disaksikan secara Virtual oleh Min Usiher. Dalam sambutannya secara virtual, Min Usiher mengatakan, proses rotasi dan promosi jabatan, merupakan hal yang wajar dalam rangka tour of duty.

Beliau berharap, serti-jab tidak diartikan hanya secara seremonial, namun pergantian jabatan, merupakan bentuk tanggung jawab dari pejabat lama ke pejabat baru.

”

Oleh karena itu, seluruh Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Lampung, sudah menjadi tanggung jawab edi, makanya segera menyesuaikan diri, ditengah dinamika yang ada

pesan Min Usiher

Kegiatan dilanjutkan dengan Penayangan Video Profil Iwan Santoso selama berkarir di Kanwil Kemenkumham Lampung, selanjutnya, memberikan sambutan, Iwan Santoso mengucapkan terima kasih atas seluruh Jajaran FORKOPIMDA yang selama ini telah secara baik bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Lampung, kedepannya semoga sinergitas



Serah Terima Jabatan dari Iwan Santoso kepada Edi Kurniadi serta disaksikan secara Virtual oleh Staf Ahli Min Usiher



Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto membacakan sambutan Gubernur Lampung

”

Saya berharap FORKOPIMDA Provinsi Lampung dapat memberikan apa yang telah diberikan sebelumnya kepada Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso

ujar Edi



yang telah terjalin dapat lebih erat dan baik lagi. Tak lupa Iwan Santoso juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung apabila selama dalam bertugas ada kekhilafan dan kesalahan. Edi Kurniadi juga memberikan sambutan yang menyampaikan bahwa Beliau sebelumnya sudah pernah ber-

tugas di Kanwil Kemenkumham Lampung, sehingga diharapkan dengan kemampuan dan pengetahuan beliau tentang Kanwil Kemenkumham Lampung untuk bisa meneruskan kerja baik yang selama ini telah dibangun oleh Bapak Iwan Santoso. Edi juga berharap FORKOPIMDA dapat terus bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Lampung. Sekretaris Provinsi

Lampung, Fahrizal Darminto juga menyampaikan sambutan Gubernur Lampung dan juga Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Imam Santoso turut memberikan kesan dan pesan sebagai perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dan ditutup dengan pemberian cinderamata serta foto bersama. •



DIRJEN AHU BERIKAN PENGUATAN

Pada Divisi Pelayanan Hukum dan
HAM Kanwil Kemenkumham Lampung

17/03





◀ Dua dari kanan, Kakanwil Edi Kurniadi membuka kegiatan penguatan oleh Dirjen AHU

Berlangsung di Aula Kantor Wilayah, Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar berikan penguatan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada hari ini, Kamis (17/03/2021).

Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU), Mohamad Aliamsyah; Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha; Kepala Divisi Administrasi, Topan Sapuan; Ketua Pengwil INI Lampung, Zul April; Tamu Undangan dan Seluruh Pegawai di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung.

Acara dibuka oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM, Bpk. Edi Kurniadi, dilanjutkan dengan Pemaparan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengenai Kegiatan yang telah dilaksanakan, data-data yang ada di Subbidang Pelayanan AHU serta Anggaran di Subbid AHU.



▲ Dirjen AHU, Cahyo R. Muzhar saat memberikan penguatan kepada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankum) menyampaikan laporannya mengenai capaian Kanwil Kemenkumham Lampung khususnya Bidang Administrasi Hukum Umum. Kadiv Yankum menyampaikan bahwa layanan dibidang AHU hampir seluruhnya telah dilaksanakan secara elektronik/online yang pelaksanaannya dikordinasikan oleh Ditjen AHU dan server layanan berada pada Ditjen AHU.

Layanan yang telah dilaksanakan secara online adalah Layanan Pendaftaran Fidusia, Layanan Kenotariatan, Layanan Pendaftaran Badan Hukum, Layanan Pendaftaran Badan Usaha, Layanan Pendaftaran Kewarganegaraan, Layanan Pengangkatan PPNS, Layanan Pendaftaran Wasiat. Selain layanan secara elektronik/online, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung juga melaksanakan layanan dibidang Administrasi Hukum Umum yang dilaksanakan secara manual. Layanan yang masih dilaksanakan secara manual adalah Layanan Pelantikan Notaris, Layanan Pelantikan PPNS, Layanan Pelantikan Kewarganegaraan, Pengawasan Notaris serta sosialisasi dan konsultasi dibidang Layanan AHU.



▲ Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha memaparkan capaian di Bidang Administrasi Hukum Umum

”

Diharapkan dengan adanya penguatan ini, kinerja Kanwil Kemenkumham Lampung khususnya Bidang AHU dapat lebih baik dan lebih PASTI dalam melayani masyarakat



◀ Dua dari kanan, Kakanwil Edi Kurniadi membuka kegiatan penguatan oleh Dirjen AHU

Acara dilanjutkan dengan Arahan mengenai Penguatan Tugas dan Fungsi Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mengenai Perseoran Perorangan, FATF, Legalisasi, dan Panduan Sosialisasi yang ada di layanan AHU. Diharapkan dengan adanya penguatan ini, kinerja Kanwil Kemenkumham Lampung khususnya Bidang AHU dapat lebih baik dan lebih PASTI dalam melayani masyarakat. Acara ini dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan ditutup dengan foto bersama

Saksikan Pelatihan Barista dan Pembuatan Roti Raja Bakery

Disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Maizar, Dirjen AHU beserta rombongan diajak untuk menikmati se-cangkir kopi di "Café Zaar's" Lapas Kelas I Bandar Lampung. Turut mendampingi dari Kanwil Kemenkumham Lampung, Kakanwil Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi dan Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputranto serta para pejabat lainnya.



▲
Melihat dan mencicipi pembuatan Roti "Raja Bakery" hasil dari Lapas Kelas I Bandar Lampung

Selanjutnya, Cahyo Rahadian berkeliling area Lapas Kelas I Bandar Lampung dari Dapur, Perpustakaan, Klinik Pancasila, serta Area Kegiatan Pelatihan Bimbingan Kerja. Di area Pelatihan Bimbingan Kerja tampak beberapa WBP Lapas Rajabasa sedang mengadakan Pelatihan Barista untuk menuju usaha mandiri bagi warga binaan yang bekerja sama Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK) Teladan Sahabat.

Cahyo juga melihat pembuatan kain siger khas Lampung yang ditunen oleh tangan WBP Lapas Rajabasa serta melihat pembuatan Roti "Raja Bakery" hasil dari Lapas Kelas I Bandar Lampung dan langsung mencicipi Roti.

Tenis Meja Jadi Olahraga Sore

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar bersama Kadivpas Lampung dan rombongan menyempatkan diri untuk berolahraga tenis meja (pingpong) di Aula Lapas Rajabasa bersama dengan Petugas dan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP).

Di sela-sela serunya olahraga Kalapas Kelas I Bandar Lampung menyampaikan, "Satu hal yang membuat kami senang adalah beliau Bapak Cahyo Rahadian Muzhar berkenan dan menyempatkan untuk melakukan olahraga tenis meja bersama petugas dan WBP, dan terlihat antusias serta bersemangat". Ujar Maizar. •



Bupati Lampung Tengah Terima Audiensi Kakanwil Kemenkumham Lampung Beserta Rombongan

21/03



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Edi Kurniadi bersama dengan Para Kepala Divisi Jaringan Kanwil Kemenkumham Lampung melakukan audiensi ke Rumah Dinas (Nuwo Balak) Bupati Lampung Tengah. Senin (21/03/2022)



▲
Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad menyambut rombongan Kanwil Kemenkumham Lampung

Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad menyambut secara langsung kedatangan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung beserta rombongan. Dalam Audiensi yang dilaksanakan, Musa Ahmad mengungkapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh Kanwil dan Rombongan.

Kepala Divisi Keimigrasian juga menyampaikan hal-hal terkait dengan Tugas Keimigrasian yang sekiranya dapat menjadikan sinergi antara Pemerintah Lampung Tengah dengan Kanwil Kemenkumham Lampung terjalin semakin erat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha juga menyampaikan bahwa terkait dengan Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan, Mau-pun Hal-hal yang menyangkut Pelayanan Hukum seperti pendaftaran merk, hak cipta dan lainnya di Lampung Tengah, Kanwil Kemenkumham Lampung dapat memberikan pelayanan terbaik pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. •

”

Terima kasih atas support yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lampung Tengah selama ini yang diberikan pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih.

pugas Edi Kurniadi





Tingginya Kesadaran Hukum Sangat Mendukung Iklim Investasi

21/03





Mataram – Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan mencapai kemajuan. Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly saat mengukuhkan desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (21/3/2022).

“Karena suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sangat mendukung iklim investasi,” kata Yasonna, di Kanwil Kemenkumham NTB.

Menurut Yasonna, hal tersebut erat kaitannya dengan komitmen Presiden Joko Widodo dalam upaya peningkatan dan pembenahan, salah satunya dalam sektor investasi melalui kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) sebagai bekal menyongsong era perdagangan bebas.

”

KERJA sama dengan para investor merupakan salah satu hal yang perlu ditempuh oleh setiap negara untuk meningkatkan perekonomian khususnya di masa pandemi saat ini

pesan Yasonna

Yasonna melanjutkan, kerja sama itu diyakini dapat mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, serta sesuai kaidah pelaksanaan kerangka pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jang-

ka Menengah tahun 2020-2024. “Menghadapi kenyataan inilah Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional beserta jejaringnya di Kantor Wilayah Kemenkumham terus mengupayakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat ke depannya yang diselaraskan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman terlebih dalam masa pandemi Covid-19,” ujar Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut.

Sehubungan masih diperlukannya data dukung lanjutan untuk proses penetapan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan Provinsi NTB; serta sebagai bagian dari proses pembinaan, maka pada hari ini telah diserahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait 63 Desa/Kelurahan Binaan.



▲ Menkumham saksi penandatanganan dokumen hibah oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dirjen Pemasarakatan

Apabila telah memenuhi kriteria dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum untuk menerima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yasonna meminta selalu dilakukan monitoring terhadap Desa/Kelurahan yang telah berstatus Desa/Kelurahan Binaan, sebelum ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui SK Menkumham.

"Karena status atau predikat tersebut, sesuai aturan, dapat ditinjau kembali atau bahkan dicabut apabila kondisi di lapangan sudah tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan," ungkap Yasonna.

Dalam acara tersebut, Yasonna juga menyaksikan penandatanganan dokumen hibah oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dirjen Pemasarakatan. Hibah tersebut berupa lahan dan bangunan yang nantinya dipergunakan sebagai tempat untuk UPT Pemasarakatan, utamanya dalam pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. •

”

Mari kita senantiasa bergandengan tangan, bahu membahu, dan mencari solusi secara bersama-sama, sehingga setiap persoalan yang dihadapi dapat ditangani dengan baik

—
pungkas Yasonna



Ajukan kenaikan kelas kanim Kelas III Non TPI Kotabumi, Tim Kelembagaan Roren Lakukan Peninjauan Langsung dan Validasi Data

21/03



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melakukan pendampingan evaluasi kenaikan Kelas untuk Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi pada hari ini, Senin (21/03/2022). Kegiatan ini dilakukan bersama dengan peninjauan langsung dan validasi data oleh Tim Kelembagaan Biro Perencanaan (Roren) Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan HAM RI.

Hadir dalam acara ini Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Basnamara beserta tim sebagai pendamping dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan Sub Koordinator Kelembagaan, Sari Mesfriati beserta tim sebagai peninjau lapangan dan validator dari Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan HAM RI. Rombongan tiba dan disambut

langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi, Amrulloh Shodiq beserta jajaran.

Dalam kesempatan ini Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi menyampaikan bahwa berdasarkan cakupan luas wilayah kerja Kantor Imigrasi dan sesuai dengan banyaknya permintaan pelayanan keimigrasian maka Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi mengajukan kenaikan kelas pelayanan.

Tim Kelembagaan Biro Perencanaan melakukan pemeriksaan berkas dan peninjauan lapangan secara langsung untuk validasi data yang akan menjadi data dukung pengajuan kenaikan kelas ke Menpan. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. •

”

permintaan paspor dan layanan keimigrasian lainnya masih tergolong banyak, mengingat sebentar lagi akan diadakan event surfing skala internasional di Pantai Krui, Pesisir Barat yang sempat vakum karena pandemi.

kata Basnamara



TERUS BERSINERGI KUATKAN TUSI



23/03



Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Pererat Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum

Menjalin sinergitas Antar Aparat Penegak Hukum (APH) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Edi Kurniadi beserta rombongan melakukan Audiensi ke Kepolisian Daerah Lampung. Rabu (23/03/2022)



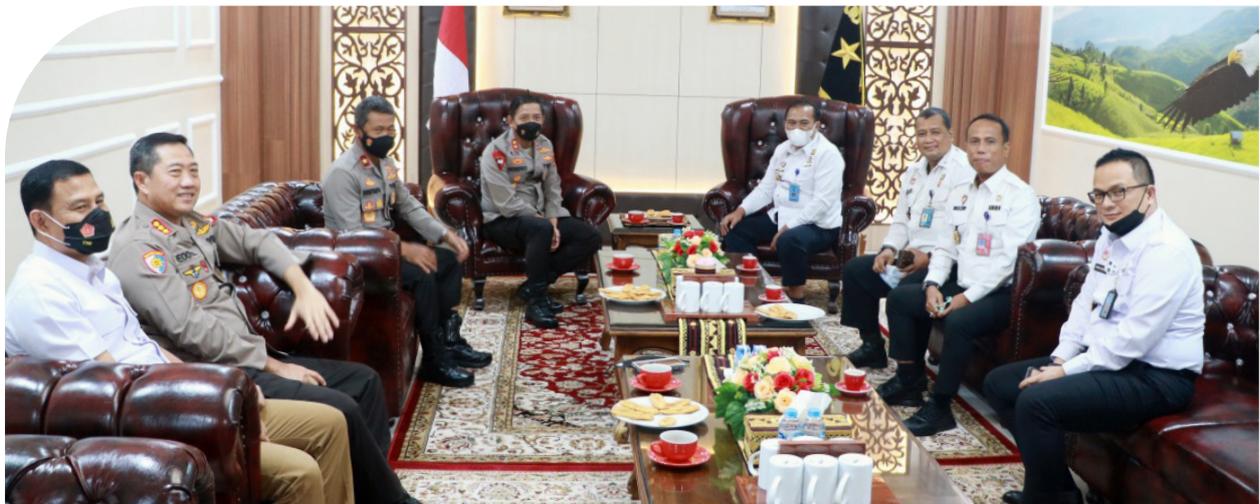
Edi Kurniadi bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto audiensi diterima langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Irjen Pol. Hendro Sugiatno beserta jajarannya di Ruang Tamu Polda Lampung.

Berbincang dengan antusias, Edi Kurniadi menyampaikan terimakasih atas sinergitas yang telah terjalin antara Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan Polda Lampung selama ini. Harapannya kedepannya Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama dengan Polda Lampung bisa terus menjalin sinergitas yang lebih baik dan erat lagi.

Irjen Pol. Hendro Sugiatno juga berharap dengan segala sinergitas yang telah terjalin antara Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan Polda Lampung dapat membangun Provinsi Lampung "Sai Bumi Ruwa Jurai" semakin Berjaya. Is Edy Ekoputranto juga memberikan beberapa solusi dan Kerjasama terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Keimigrasian yang di sambut baik dengan Irjen Pol. Hendro Sugiatno.



▲ Kapolda Lampung, Irjen Pol. Hendro Sugiatno memperkenalkan jajaran Polda Lampung





▲
Kajati Lampung, Nanang Sigit Yulianto
menerima audiensi jajaran Kanwil
Kemenkumham Lampung

Audiensi dengan Kajati Lampung

Sinergitas antar Aparat Penegak Hukum merupakan pondasi dalam terciptanya Criminal Justice System. Demi meningkatkan sinergitas yang selama ini sudah terjalin dengan baik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi di didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto; dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, Rabu (23/03).

Rombongan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung disambut langsung dengan hangat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Nanang Sigit Yulianto didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Asnawi. Selain menguatkan koordinasi dan sinergitas, audiensi ini juga dilakukan dalam rangka silaturahmi dan saling mengenal antar Kakanwil Kumham Lampung dengan Kajati Lampung yang baru saja dilantik pada awal bulan ini.

Dalam perbincangan, Kakanwil Kumham Lampung mengemukakan koordinasi dan sinergitas yang telah terbentuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung harus terus terjaga dengan baik. Karena hal ini juga berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Aparat Penegak Hukum agar selalu berjalan beriringan demi terciptanya *Criminal Justice System*. •

”

Senada dengan Kakanwil Kumham Lampung, Kajati Lampung juga berharap kedepannya kerjasama dan koordinasi serta kolaborasi yang kuat antar instansi ini semakin baik dan dapat terus bersinergis mendukung komitmen bersama tentunya dalam keberhasilan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Gelar Rakor Timpora, Kanwil Kemenkumham Lampung Tingkatkan Koordinasi dan Sinergitas dalam Pengawasan Orang Asing

23/03

Penyebaran Covid-19 di sejumlah negara, termasuk Indonesia, berdampak pada keterbatasan mobilitas warga dunia, baik menuju ke negara tertentu atau kembali ke negara asal, hal ini terkendala pada ketersediaan/ketentuan alat angkut dan kebijakan peraturan keimigrasian. Dalam rangka memperkuat upaya pengawasan mobiltas tersebut terutama di Provinsi Lampung, di tengah situasi pandemi saat ini, bertempat di Ruang Pertemuan Solideo, Hotel Grand Anugerah, Lampung, pada Rabu (23/3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan mengundang instansi/lembaga terkait yang merupakan anggota dari Timpora Provinsi Lampung.



Kakanwil dan Pimti Pratama menyapa peserta Rakor Timpora

Adapun "Sinergitas dan Kolaborasi Antar Instansi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Provinsi Lampung dalam Penguatan Pengawasan Terhadap Orang Asing" adalah tema yang diangkat pada kegiatan Rakor.

”

Saya yakin bahwa sinergitas seluruh anggota tim akan membawa penegakan hukum di bidang keimigrasian ke tingkat yang lebih baik lagi, yang mampu mendukung berbagai kebijakan pemerintah di berbagai bidang lainnya, sesuai dengan salah satu fungsi keimigrasian yaitu sebagai fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional.

ucap Edi

Rakor Timpora dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi; yang di damping oleh Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Eko Purtranto; dan Kepala Divisi Pemas-yarakatan; Farid Junaedi. Adapun instansi/lembaga yang diundang dalam kegiatan Rakor Timpora, yakni: Kejaksaan Tinggi Lampung; Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam Lampung; Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung; Pangka-

lan TNI Angkatan Udara Lampung; Kepolisian Daerah Lampung; Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung; Badan Intelijen Negara Daerah Lampung; Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Lampung; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.



Terselenggaranya Rakor Timpora ini adalah sebagai upaya penguatan koordinasi dan peningkatan sinergitas antara para anggota Timpora Wilayah Lampung dalam mengawasi mobilitas / lalu lintas orang asing dalam rangka menanggulangi penyebaran pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang merupakan langkah implementasi sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya adalah pembatasan sosial pada tiga jenis kegiatan: pendidikan dan perkantoran, keagaamaan, dan kegiatan di tempat umum dengan pengecualian pada kebutuhan dasar pangan dan kesehatan.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung menyampaikan harapannya bahwa pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPO-RA) diharapkan dapat meningkatkan sinergitas di antara berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan orang asing dalam hal pengawasan orang asing tersebut. Sinergitas ini akan tercapai jika masing-masing instansi aktif mengambil peran dalam kegiatan Pengawasan Orang Asing yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing Kementerian/Lembaga dan juga aktif berupaya meningkatkan in-

tensitas komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan di lapangan tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 5 M, Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, serta Membatasi Mobilitas. •



”

Sinergitas ini akan tercapai jika masing-masing instansi aktif mengambil peran dalam kegiatan Pengawasan Orang Asing yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing Kementerian/Lembaga dan juga aktif berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan di lapangan

pesan Edi



2022 Sebagai Tahun Hak Cipta, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Promosi dan Diseminasi Hak Cipta

24/03



Sebagai sarana diskusi mengenai Hak Cipta yang ada di Provinsi Lampung yang bertujuan menyebarkan informasi, peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang Hak Cipta. Kamis (24/03/2022) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menyelenggarakan Kegiatan Promosi dan Diseminasi Hak Cipta Tahun 2022 dengan mengangkat tema Peningkatan Edukasi Kekayaan Intelektual Hak Cipta Melalui Sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta yang bertempat di Swiss-Bell Hotel Lampung.



Hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan, Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi, Kepala Divisi

Keimigrasian, Is Edi Ekoputran-to, Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia OP, dan Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, Adil Jaya Negara serta para peserta

dari Akademisi dan mahasiswa/i, seniman, budayawan, dan stakeholder. Narasumber pada kegiatan ini antara lain: Aulia Andriani Giartono (Sub Koordinator Administrasi Permohonan, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri pada Ditjen Kekayaan Intelektual





▲ Kabid Pelayanan Hukum, Rugun Pakpahan memberikan laporan Kegiatan



▲ Aulia Andriani Giartono menjelaskan pentingnya pendaftaran HKI



▲ Indra Jamal Nur menyampaikan tentang Pentingnya Pencatatan Hak Cipta Bagi Seniman

”

Saat ini, untuk mendukung kecepatan, kepastian, dan peningkatan kepercayaan pemohon hak cipta, Direktorat Kekayaan Intelektual telah memiliki sistem/ aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta atau POP HC.”

ujar Edi

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Indra Jamal Nur (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, dan Ade Arif Firmansyah (Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Lampung).

Acara dimulai dengan penyampaian Laporan Ketua Penyelenggara Kegiatan oleh Kepala Bidang Hukum, RUGun Tresia OP yang dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Kakanwil Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi yang menyampaikan bahwa Tahun 2022 merupakan Tahun Hak Cipta dan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Hak Cipta Tahun 2022.

Edi juga menyampaikan bahwa terdapat 4 (empat) pilar utama Kekayaan Intelektual yaitu penciptaan karya intelektual, elemen perolehan atau perlindungan Kekayaan Intelektual, pilar komersialisasi yang merupakan mesin penggerak ekosistem Kekayaan Intelektual, dan penegakan hukum.

"Inovasi POP HC dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pemahaman yang tinggi diharapkan memacu kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam menghasilkan karya cipta dan mendaftarkan hak ciptanya yang berdampak pada pemulihan ekonomi nasional." Tegas Edi. Menutup sambutan, Edi Kurniadi berharap masing – masing pihak dapat saling bersinergi sehingga menjadi langkah awal dalam

mewujudkan masyarakat yang aktif untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya dengan membuat dan mendaftarkan hak ciptanya.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dimoderatori oleh Fungsional Madya Penyuluh Hukum, Erwin Setiawan Yuniyanto, Pemateri pertama Aulia Andriani Giartono menyampaikan tentang Sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan

Hak Cipta (POP HC) di Era Digital. Pemateri kedua, Indra Jamal Nur menyampaikan tentang Pentingnya Pencatatan Hak Cipta Bagi Seniman. Dan Pemateri Ketiga, Ade Arif Firmansyah menyampaikan tentang Potensi Permohonan Pencatatan Hak Cipta di Perguruan Tinggi. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber yang berlangsung sangat antusias dan bersemangat. •



◀ Ade Arif Firmansyah saat menyampaikan tentang Potensi Permohonan Pencatatan Hak Cipta di Perguruan Tinggi

Peserta disemениasi berasal dari Akademisi dan mahasiswa/i, seniman, budayawan, dan stakeholder terkait.





Bertemu Menteri Kehakiman Filipina, Yasonna Laoly Tegaskan Perlindungan Warga Terdaftar Indonesia dan Penguatan Kerja Sama Hukum



25/03



Manila – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly bertemu dengan Menteri Kehakiman Filipina, Menardo Guevarra, di Manila, Jumat (25/3/2022). Dalam pertemuan itu, Yasonna menegaskan perlindungan hukum pada warga terdaftar Indonesia dan penguatan kerja hukum Indonesia-Filipina.



Kedua menteri sepakat bahwa Filipina maupun Indonesia memiliki perhatian yang tinggi terhadap warga-warga keturunannya, khususnya di wilayah Sangihe dan Davao. Tingginya angka kunjungan dan mix marriage di kedua daerah tersebut menjadi prioritas, yang mendorong pemerintah kedua negara memenuhi perlindungan hukum serta memberikan fasilitas kepastian identitas kewarganegaraan maupun perlindungan hukum atas hak-kewajiban keperdataan internasional khususnya bagi anak berkewarganegaraan ganda.



▲
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly bertemu Menteri Kehakiman Filipina Menardo Guevarra di Manila

”

Memberikan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri merupakan bagian dari misi prioritas kami, harapan kami program pendaftaran dan konfirmasi akan terus berlanjut untuk menyelesaikan status dari 2.500 keturunan Indonesia yang belum dapat terdaftar.

—
kata Yasonna

Dalam pertemuan itu, Yasonna menyampaikan terima kasih karena pada 2018, *Department of Justice* (DOJ) Filipina melalui *Department Circular No. 026 Regarding the Guidelines on the Issuance of Special Non-Immigrant Visas Under Section 47 (a)(2) of*

Commonwealth Act No. 613, as Amended, to Registered Indonesian Nationals (RINs), telah mengatur pemberian visa/izin tinggal *Special Non-Immigrant Visa* selama 5 tahun secara GRATIS untuk RINs yang berasal dari *Persons of Indonesian Descent (PID)*s. Hingga saat ini 835 RINs telah mendapatkan *endorsement special non immigrant visa/47 (a) (2)* dari DOJ dengan masa berlaku 5 tahun.

Sebagai hasil program pendaftaran dan konfirmasi kewarganegaraan terhadap 8.745 PIDs dan diperoleh jumlah 3.345 orang terkonfirmasi sebagai WNI/RINs di mana 466 di antaranya berstatus anak berkewarganegaraan ganda. Hingga saat ini Indonesia telah menerbitkan 1.259 dokumen perjalanan RI (paspor) RINs. Selain itu, Yasonna dan Menardo Guevarra juga bersepakat agar kedua negara meningkatkan kerja sama hukum secara bilateral di bidang Mutual

Legal Assitance (MLA) in Criminal Matters/Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Menurut Yasonna, usul ini akan memperkuat hubungan yang lebih erat antara Filipina dan Indonesia mengingat keduanya telah memiliki *Mutual Legal Assistance Treaty (ASEAN MLAT)* di bawah payung ASEAN.

Disisi lain Menkumham berharap Filipina dapat mendukung pembentukan *ASEAN Extradition Treaty* yang saat ini sedang dibahas dalam *ASLOM Working Group on ASEAN Extradition Treaty*, harapan ini kuat dapat terwujud karena Indonesia dan Filipina telah memiliki *Perjanjian Ekstradisi* sejak tahun 1976. "Kerja sama bidang hukum dan HAM seperti perjanjian MLA dan ekstradisi juga bermanfaat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, penanggulangan kejahatan transnational orga-



nized crimes termasuk trafficking in persons, terrorism, smuggling of persons and/or goods, serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery,” ujar Yasonna.

Pada kerja sama level regional melalui forum ASEAN Law Ministers Forum, Menkumham Yasonna berharap kedua negara tetap saling mendukung dan bekerjasama secara erat untuk menguatkan rule of law, judicial system, legal instructure, harmonization and integration of ASEAN trade laws, yang sejalan dengan ASEAN Political and Security Community Blueprint 2025.

Yasonna Laoly berangkat ke Filipina pada Kamis 24 Maret 2022 untuk membahas sejumlah hal dengan pemerintah Filipina yang dilatarbelakangi hubungan bilateral yang sangat baik karena letak geografis maupun hubungan tali sejarah yang panjang semenjak kedua negara berjuang meraih kemerdekaan masing-masing. Gueverra menyambut hangat kunjungan Menkumham yang dianggap sangat penting dan menyampaikan bahwa ini merupakan kunjungan kedua seorang Menteri

”

Saat ini Indonesia, Filipina dan Malaysia telah memiliki kerja sama Triteral Cooperative Arrangement yang melingkupi berbagai kegiatan pelatihan keamanan dan pengawasan untuk counter terrorism activitiest baik di darat, laut dan udara. Peningkatan kerja sama bilateral akan memperkuat hubungan diplomatik kedua Negara.

Sambung Yasonna

diterima di Gedung Departement of Justice (DOJ) of Philippine yang baru di Manila.

Gueverra juga menyampaikan selamat kepada Yasonna yang dianugerahkan Penghargaan Presidential Awards For Filipino Individuals and Organizations Overseas (PAFIOO) tahun 2021 oleh Presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte.

Hadir mendampingi Menkumham Yasonna Laoly, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Luar Negeri-Linggawati Hakim, Djan Fariz-Penasihat Menteri Hukum dan HAM, Pramella Yunidar Pasaribu-Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Baroto-Direktur Tata Negara, dan Tudio-no-Direktur Otoritas dan Hukum Internasional beserta jajaran dari Kedutaan Besar RI untuk Filipina di Manila, Konsulat Jenderal RI di Davao City, Direktorat Jenderal Keimigrasian dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kegiatan ditutup dengan pemberian cinderamata dan foto bersama anggota kedua delegasi. •

Kanwil Kemenkumham Lampung Terima Audiensi dan Koordinasi KPK

24/03



Kamis (23/03), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menerima kunjungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kunjungan kali ini dalam rangka Audiensi dan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi Tahun 2022. Hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi di didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto; dan Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junae-

di beserta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Imigrasi di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkunjung Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi & Supervisi Wilayah II KPK, Andy Purwana didampingi para Koordinator Wilayah Lampung, Wilayah Sumatera Selatan, dan Wilayah Bangka Belitung. Dalam Sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi mengatakan Kantor Wilayah Lam-

pung berkomitmen dalam menerapkan tata nilai budaya kerja Kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif) dan meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan Good Governance dan Clean Governance.

Edi menyampaikan, "Kepuasan pengguna layanan juga menjadi fokus perhatian, hal ini dapat dimonitoring melalui aplikasi survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan dipublikasikan





Foto bersama usai audiensi ▲

”

"Seluruh Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung berperan aktif dalam Pencegahan dan Pengendalian Korupsi secara konsisten dengan menjalani Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Aplikasi pelaporan melalui website E-Lapor yang pada tahun 2022 ini pengaduan masih NIHIL."

ujar Edi

pada website dan kanal sosial media seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Pada periode maret 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung memperoleh predikat IPK/IKM "Sangat Baik" dengan nilai 3,82 (skala 4)."

Menutup sambutan, Edi berharap dengan audiensi dan koordinasi yang dilakukan oleh KPK ini dapat memnerikan sharing knowledge kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sehingga terhindar dari tindak pidana Korupsi. Tidak lupa Edi mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk selalu optimis, selalu berfikir positif, berkata-kata positif, dan berperilaku positif, supaya hasilnya pun akan positif.

Selanjutnya, Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi & Supervisi Wilayah II KPK, Andy Purwana memaparkan mengenai strategi dalam pemberantasan korupsi yaitu Penindakan, Pencegahan, Edukasi dan Kampanye. Menurut pemahaman pasal 2 UU no. 31 th. 1999 Jo. UU no.20 th 2001, Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. Kunjungan yang dilakukan saat ini merupakan sebuah bentuk implemtasi strategi pemberantasan korupsi. •



Kunjungi Lapas Metro, Kepala Kantor Wilayah Lampung Tinjau Langsung Kegiatan Kerja dan Industri Unggulan

25/03



▲ Kakanwil, Edi Kurniadi meninjau pelatihan barista, roastery kopi di Lapas Kelas II Metro

Pada Jumat (25/3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi mengunjungi Kota Metro untuk melaksanakan kunjungan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Metro. Kedatangan Edi beserta rombongan diterima langsung oleh Kepala Lapas Metro, M. Mulyana; bersama Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Metro, Sukir; dan Plt. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Metro, Rohmadi.



▶ Meninjau budidaya perikanan hasil program bimbingan kerja



Kunjungan Edi kali ini adalah dalam rangka peninjauan kegiatan bimbingan kerja dan industri para warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Metro. Dalam masa kunjungannya di Lapas Metro, Edi menyempatkan diri mengunjungi beberapa area kegiatan. Lapas Metro memiliki sejumlah program bimbingan/kegiatan kerja dan industri di antaranya: budidaya perikanan, pertanian sayur, pertukangan, pengelasan, teknik

pendingin dan tata udara, pelatihan tata rambut, pelatihan barista, roastery kopi, sulam tapis dan menjahit. Pada kesempatannya menjawab pertanyaan awak media terkait kunjungan kerjanya hari ini. Edi berharap keterampilan dan keahlian yang didapatkan selama menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup warga binaannya ketika telah bebas dan kembali ke masyarakat nanti. •

”

Bimbingan ataupun kegiatan kerja yang diprogramkan kepada WBP bertujuan untuk membekali para warga binaan dengan keterampilan dan keahlian nyata yang dapat diterapkan di dunia kerja.

ungkap Edi





Kadiv Pemasarakatan Pimpin Proses Pemindahan 9 Narapidana ke Lapas di Wilayah Nusakambangan

25/03



Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan persetujuan pemindahan 9 (Sembilan) orang narapidana dari Lembaga Pemasarakatan Kelas I Palembang ke Lembaga Pemasarakatan di Wilayah Nusakambangan yang merupakan Lapas dengan Super Maximum Security dan transit di UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Jum'at (25/03/2022).



▲
Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi (baju merah) meninjau langsung pemindahan 9 narapidana

Petugas memasang rantai pengaman

Petugas selesai memasang ▶
rantai pengaman kepada Napi
yang akan dipindahkan



◀ Narapidana yang dipindahkan
merupakan Napi dengan kasus
narkotika dan pembunuhan

Adapun 9 (Sembilan) narapidana yang dipindahkan antara lain berinisial M (Pembunuhan/15 Tahun), DP (Pembunuhan/Seumur Hidup), LW (Narkotika/20 Tahun 3 Bulan), H (Narkotika/ 10 Tahun 4 Bulan), RMD (Narkotika/ 11 Tahun 4 Bulan), ES (Narkotika/12 Tahun 3 Bulan), MB (Narkotika/ 10 Tahun 3 Bulan), IY (Narkotika/ 9 Tahun 3 Bulan), dan A (Narkotika/ 9 Tahun 4 Bulan). Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung, Dr. Farid Junaedi mengawal secara langsung pro-

ses pemindahan narapidana yang berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Lampung. Menurut Dr. Farid Junaedi, proses pemindahan ini sebagai bentuk Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam mengendalikan, mencegah dan memutus rantai peredaran narkoba di lapas maupun rutan. Proses pemindahan narapidana dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB dimana UPT Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung menjadi tempat transit pemindahan narapidana. •

”

Jajaran Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung akan terus siap dalam merespon dengan baik terkait pencegahan peredaran narkoba.

—
pungkas Farid

Perkuat Kapasitas Notaris Awasi Pencucian Uang, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Audit Kepatuhan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

25/03



Bertempat di Ruang Legal Drafter, Pada Senin (28/3), Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan pemahaman Audit Kepatuhan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris di Wilayah. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., didampingi Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Hidayatullah Islamy. Kegiatan mengundang segenap keanggotaan Tim Pengawasan



Jalannya Audit Kepatuhan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris di Wilayah

”

Sebagai pelapor, notaris memiliki kewajiban menerapkan PMPJ dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) oleh Notaris ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sehingga notaris benar-benar akan terlindungi dari praktik kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana terorisme (Tipiter).

kata Alpius



▲
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha membuka jalannya kegiatan

Wilayah dan Daerah terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah. Secara keseluruhan, tim yang dibentuk berasal dari Majelis Pengawas Notaris tingkat Wilayah dan Daerah, yang mewakili unsur Pemerintah, Profesi Notaris, akademisi, serta dari Kesekretariatan.

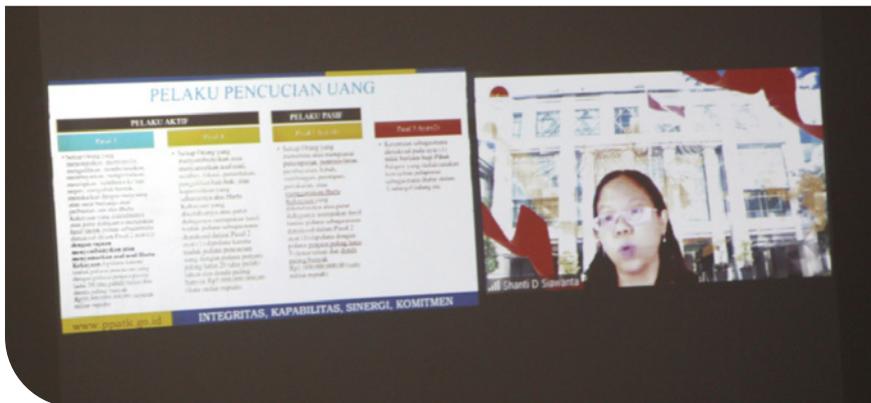
Dalam pembukaannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., menyampaikan bahwa salah satu pelaksana yang melaporkan kegiatan-kegiatan terutama terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme adalah Notaris. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Lampung berkomitmen dalam menyosialisasikan dan memberikan pemantapan dengan Notaris terkait PMPJ dan LTKM ini. Adapun Narasumber kegiatan berasal Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Narasumber dari MPPN Fardian, menyampaikan bahwa tahapan PMPJ yaitu Identifikasi, Verifikasi dan Pemantauan Pengguna Jasa Notaris. Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor (Notaris) dalam PMPJ untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa, melakukan verifikasi dokumen, Memantau

Transaksi, serta Melaporkan Transaksi kepada Otoritas Berwenang, sebagai pemenuhan Kewajiban Ketentuan Perundang-Undangan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Terorisme. Ruang Lingkup PMPJ meliputi: Pembelian dan Penjualan Properti, Pengoperasian; Pengelolaan Perusahaan, Pendirian, Pembelian, dan Penjualan Badan Hukum; Pengelolaan Rekening Giro, Tabungan, Deposito, dan Efek; Pengelolaan terhadap Uang, efek, dan/atau Produk Jasa Keuangan lainnya. PMPJ diterapkan Ketika terpenuhinya salah satu anasir: Notaris melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; terdapat Transaksi Keuangan dengan

Kepala Subbidang Pelayanan AHU Hidayatullah Islamy (kiri) saat memberikan penjelasan



Santhi D. Siawanta, Narasumber dari PPATK menjelaskan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

mata uang Rupiah dan/atau mata uang Asing yang nilainya atau setara dengan Rp. 100 juta; terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; dan Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Lebih lanjut Santhi D. Siawanta, Narasumber dari PPATK menyampaikan bahwa ruang lingkup audit Kepatuhan dibagi atas: bidang PMPJ meliputi Pengawasan aktif Notaris, Kebijakan dan prosedur, Pengendalian internal, Sistem informasi dan pelaporan, Sumber daya manusia dan pelatihan; dan bidang Kewajiban Pelaporan meliputi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Proses audit dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu: 1. Perencanaan, mencakup

”

Audit kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK.

—
ujar Santhi

hasil koordinasi, rencana triwulan, rencana tahunan, dan matrik jadwal audit; 2. Pelaksanaan, terbagi atas: Praaudit (pemberitahuan, permintaan data, rencana kerja, dan pengantar), audit lapangan (kertas kerja, berita acara, lampiran), Pascaaudit (Laporan, surat pembinaan/informasi, dan penatausahaan dokumen); 3. Pemantauan, mencakup surat pemantauan I, II, dan Rekomendasi sanksi. Tim Audit berwenang: Meminta dokumen yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Notaris termasuk hak akses terhadap sistem informasi dan basis data; Meminta keterangan kepada Notaris; dan/atau Memasuki pekarangan, lahan, gedung atau properti yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Notaris atau pihak lain yang melaksanakan kewajiban Notaris. •

Sukseskan Penilaian KKP HAM Tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Koordinasi

28/03



Edi Kurniadi membuka jalannya Rapat Koordinasi KKP HAM Tahun 2022

”

Program KKPHAM ini memang bukan kontestasi, tetapi saya harap mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat. Untuk itu saya selaku Kepala Kantor Wilayah Lampung mengajak para pemangku kebijakan di daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam program pemenuhan HAM ini.

—
imbuh Edi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung gelar Rapat Koordinasi Penilaian Kabupaten / Kota Peduli HAM (KKP HAM) Tahun 2022 pada hari ini, Senin (28/03/2022) bertempat di Aula Kantor Wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan menteri hukum dan HAM nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota

Peduli Hak Asasi Manusia terdapat perubahan kriteria yang semula 7 Kriteria dengan 82 Indikator Penilaian KKP HAM diubah menjadi 10 Kriteria dengan 120 Indikator penilaian. Dimana sepuluh aspek variable yang dinilai dalam pelaksanaan KKP HAM didasarkan pada indikator struktur, proses dan hasil. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi yang dalam sambutannya menyampaikan



bahwa Komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputranto; dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung ini menghadirkan Narasumber dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Ibu Fransisca Mirna.

Kegiatan Rapat Koordinasi Penilaian KKP HAM 2022 ini diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mensukseskan Penilaian KKP HAM 2022. Dimana KKP HAM 2022 ini merupakan upaya pemerintah yang



▲
Peserta rapat koordinasi dari Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

bertujuan memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan tanggung jawab dan mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). •



Kakanwil Kemenkumham Lampung Tinjau Langsung Vaksinasi Booster WBP Lapas Perempuan

29/03



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurnia, di tinjau langsung Vaksinasi Booster WBP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung pada hari ini, Selasa (29/03/2022).

Virus Covid-19 masih belum sirna, virus tersebut terus bermutasi hingga muncul varian-varian baru dan terus menyebar. Disiplin mematuhi protokol kesehatan dan akselerasi vaksinasi sangat penting dilakukan untuk



Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan vaksinasi dari petugas



menekan laju penyebaran virus dan semakin cepat masyarakat terlindungi dari COVID-19 serta varian mutasinya.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Divisi Pemas-yarakatan, Farid Junaedi; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekopu-tranto; dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alphius Saruma-ha memantau langsung kegiatan Vaksinasi Booster mendampingi KaKankwil Kemenkumham Lam-pung, Edi Kurniadi.

Dalam kesempatan ini, Ka-kanwil Kemenkumham Lampung menyampaikan apresiasi dan ter-imakasih kepada Polda Lampung

yang telah memberikan bantuan berupa Vaksinasi Booster kepada WBP. Kakanwil Kemenkumham Lampung juga berharap kerjasama antar lembaga dapat terjalin baik untuk kedepannya.

Wakapolda Lampung yang turut hadir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah menar-getkan sebanyak satu juta dosis vaksin disuntikkan dalam rangka Akselerasi Vaksinasi Lanjutan (Booster) secara serentak oleh Polda di seluruh Indonesia. Vaksinasi Booster ini merupakan lang-kah pencegahan yg efektif agar seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan terbaik di masa pandemi ini. Meski sudah

divaksinasi, WBP juga tidak boleh meremehkan virus Covid varian omicron ini. Protokol kesehatan harus tetap dipatuhi agar dapat melindungi diri dan orang-orang sekitar, terlebih Lampung merupa-kan pintu gerbang ke arah pulau Sumatera.

Dalam kegiatan ini, se-banyak 237 orang Warga Binaan Lapas Perempuan Lampung yang mendapatkan Vaksinasi Booster, 20 orang Vaksinasi Kedua, dan 19 orang Vaksinasi Susulan. Kegiat-an ini ditutup dengan tinjauan langsung Kakanwil Kemenkum-ham Lampung beserta jajaran ter-hadap penyuntikan vaksinasi pada WBP. •



Kepala Kantor Wilayah Lampung Resmi Membuka Turnamen Futsal dan Lomba Karaoke di Lapas Gunung Sugih

30/03



Dalam suasana peringatan Hari Bhakti Pemasarakatan yang pada tahun ini mengangkat tema "Pemasarakatan semakin Pasti dan Berakhlak Mewujudkan Indonesia Maju", seluruh unit pelayanan teknis pemasarakatan di seluruh Indonesia menyambut dan memeriahkan Dirgahayu Ke-58 Pemasarakatan dengan menggelar Pekan Olahraga dan Seni Warga Binaan Pemasarakatan (Porsenap) 2022. Tak terkecuali Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Lampung. Pada Rabu (30/3), bertempat di Lembaga Pemasarakatan Gunung Sugih, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi; bersama Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Eko Putranto; dan Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan menghadiri dan meresmikan Turnamen Futsal dan Lomba Karaoke an-



tar warga binaan yang menjadi bagian dari kegiatan Porsenap 2022.

”

Walau sedang bersaing satu sama lain namun menang atau kalah bukan tujuannya, bahwa kegiatan ini adalah pertandingan persahabatan dan persaudaraan, sebagai ajang silaturahmi dan saling mengenal sekaligus sarana hiburan dan rekreasi selama masa pandemi

tukas Edi

Dua cabang kompetisi, turnamen futsal dan lomba karaoke, diperlombakan para warga binaan yang berasal dari 16 UPT Pemasarakatan di Jajaran Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dan pada cabang futsal untuk memperbutkan Kakanwil Cup. Kepala Lembaga Pemasarakatan Gunung Sugih, Denial Arief dalam laporannya menyebutkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah sebagai ajang menjalin silaturahmi dan pembinaan narapidana yang saling menguatkan antar UPT Pemasarakatan Se-Lampung.

Kepala Kantor Wilayah Lampung Edi Kurniadi, dalam pengarahannya memberi semangat kepada para warga binaan yang berpartisipasi, untuk menjadikan segala keterbatasan di dalam lapas/rutan sebagai universitas kehidupan, dengan menjaga sportifitas berkompetis. Edi juga menghimbau kepada semua pihak dalam kegiatan ini untuk senantiasa mematuhi porokol kesehatan meskipun Covid-19 sedang memasuki fase endemi.

Eratkan Tali Persaudaraan

Adapun susunan juara dari kedua cabang kompetisi adalah sebagai berikut:

Turnamen Futsal “Kakanwil Cup”

1. Juara 1 Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung.
2. Juara 2 Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung.
3. Juara 3 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih.

Lomba Karaoke:

1. Juara 1 Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung.
2. Juara 2 Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II Bandar Lampung.
3. Juara 3 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih.

Edi kembali berharap semua pihak baik dari para warga binaan dan ASN pemasarakatan yang terlibat di dalamnya, dapat semakin mempererat tali persaudaraan, sesuai dengan tema yang diusung di tahun ini: Pemasarakatan Semakin Pasti dan Berakhlak Mewujudkan Indonesia Maju. •



▲
Edi Kurniadi serahkan Pala Turnamen Futsal dan Lomba Karaoke di Lapas Gunung Sugih

Kanwil Kemenkumham Lampung Sambut Hangat Audiensi dan Kerjasama Universitas Malahayati Lampung

30/03



Kadivankumham terima cinderamata dari Dekan FH Universitas Malahayati

Berempat di Ruang Legal Drafter, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung terima audiensi Kerjasama dari Universitas Malahayati Lampung pada hari ini, Rabu (30/03/2022). Kerjasama yang dibahas antara Fakultas Hukum Universitas Malahayati dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung pada kesempatan ini adalah mengenai Reka Ciptaan Teknologi Tepat Guna.

Perwakilan dari Universitas Malahayati yang terdiri dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Malahayati, perwakilan Dosen, dan perwakilan Mahasiswa ini disambut langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha yang didampingi oleh Kepala Bidang Hukum, Rugun Tressia O.P., Kasubid KI, Adil Jaya Negara, Kasubid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, & JDIH, Doni Arianto Raharjo serta JFU dan JFT Bidang Hukum.

Pada kesempatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memberikan dukungannya terhadap audiensi kerjasama dari Universitas Malahayati. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan program hibah Kedai Reka Tahun 2022 dari Kemenrisetdikti tentang Reka Ciptaan Teknologi Tepat Guna oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Program tersebut akan menghasilkan website jdih.malahayati.ac.id yang didalamnya mengakomodir in-

”

Dalam kegiatan ini juga dibahas mengenai kendala-kendala yang mungkin terjadi, peran Kanwil Kemenkumham Lampung dalam program tersebut, hingga terkait pengintegrasian Universitas Malahayati selaku anggota JDIH dengan JDIHN.

formasi hukum, layanan bantuan bantuan hukum, hingga layanan pendaftaran kekeayaan intelektual. Disamping itu, hibah berupa mesin pintar (touchscreen) juga akan diberikan kepada desa binaan. Program ini masih bersifat proposal, yang masih memerlukan penilaian dan verifikasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, terutama Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, terbuka untuk bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Malahayati terkait program ini sepanjang program terkait masih

bersinggungan dengan program kegiatan Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH yang telah di rencanakan. diharapkan kerjasama antara Kanwil Kemenkumham Lampung dan Universitas Malahayati Lampung dapat terus berlangsung dengan baik. •



◀ Kepala Divisi Pelayanan Hkukum dan HAM menyambut audiensi Universitas Malahayati



◀ Kepala Subid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, & JDIH, Doni Arianto Raharjo menyimak saat pemaparan dari Universitas Malahayati



Hadiri Sertijab dan Pisah Sambut Kalapas Kotabumi, Kepala Kantor Wilayah Lampung Berpesan untuk Membina Warga Binaan dengan Memanusiakan Manusia

31/03



Dengan diangkatnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi, Endang Lintang Hardiman, menjadi Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, maka secara alami jabatan Kepala Lapas Kotabumi akan diserahkan, dan dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, Heru Suprijowinadi, diamanahkan untuk memangku jabatan tersebut sebagai pelaksana tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi.





▲ Kakanwil menyaksikan penandatanganan serah terima jabatan Kalapas Kelas Ila Kotabumi

Pada Kamis (31/3), bertempat di Lapas Kotabumi, acara serah terima jabatan dan pisah sambut kepala satuan kerja dari Endang Lintang Hardiman kepada Heru Suprijowinadi digelar. Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi yang didampingi Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; dan Kepala Divisi Masyarakat, Dr. Farid Junaedi. Turut menghadiri, segenap Kepala Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan Imigrasi beserta jajarannya. Acara serah terima jabatan disaksikan oleh anggota forum komunikasi pimpinan daerah Lampung Utara di antaranya: Bupati Lampung Utara, Budi Utomo; Komandan Kodim 0412, Letkol Inf. Andi Sultan; Kepala Polres, AKBP Kurniawan Ismail; Kepala Kejaksaan Negeri yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum,

Qori Mustikawati. Dalam kesempatannya menyampaikan sambutannya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap pejabat lama, Endang Lintang Hardiman atas kepiawaian, inovasi dan kreativitasnya dalam memimpin jajarannya hingga berhasil mengantarkan Lapas Kotabumi menjadi salah satu dari dua satuan kerja di Jajaran Kantor Wilayah Lampung yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB.

Edi berpesan bahwa dibutuhkan sinergitas antara petugas masyarakat, WBP dan masyarakat umum untuk mewujudkan masyarakat adalah mengembalikan warga binaan kembali kepada masyarakat, karena masyarakat bukan lagi soal penghukuman ataupun penjaraan. •

”

pemasyarakatan adalah sebuah lembaga yang mengelola orang-orang bermasalah, petugas pemasyarakatan harus mampu memberikan pembinaan dengan penuh tanggung jawab dalam upaya memanusiakan manusia, sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

Pesan Edi



Kamu Harus Tahu

Kekayaan Intelektual Komunal Lampung

KENALI & LINDUNGI



Apa itu Kekayaan Intelektual Komunal?

Merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.



Jenisnya apa aja sih?



1
Pengetahuan Tradisional



2
Ekspresi Budaya Tradisional



3
Sumber Daya Genetik



4
Indikasi Geografis



Pengetahuan Tradisional

Karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.



Ekspresi Budaya Tradisional

Segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Sumber Daya Genetik

Tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Yang dimaksud dengan nilai nyata atau potensial adalah kegunaan dalam hal bermanfaat dalam kehidupan manusia.



Indikasi Geografis

Tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Yang dimaksud dengan nilai nyata atau potensial adalah kegunaan dalam hal bermanfaat dalam kehidupan manusia.

Konsep Penta Helix dalam Pengawasan Orang Asing di Indonesia

Rendy Firnanda



Tidak banyak orang yang mengetahui bahwasanya pekerjaan seorang petugas imigrasi tidak melulu seputar paspor untuk jalan-jalan. Bahkan masih banyak masyarakat yang berfikir kalau paspor untuk umroh, haji, bekerja, dan jalan-jalan adalah jenis-jenis paspor yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi. Padahal paspor terdiri atas paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. (Pasal 24 ayat 2, UU No.6 Tahun 2011 ttg Keimigrasian). Paspor yang biasa kita gunakanpun adalah jenis paspor biasa yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi dan penggunaannya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. (Pasal 1 ayat 16, Undang - Undang No.6 Tahun 2011 ttg Keimigrasian).

Namun seyogyanya, kantor imigrasi tidak hanya mengurus paspor saja. Kantor imigrasi juga melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing baik yang masuk atau keluar wilayah Indo-

nesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Oleh sebab itu, anggapan tentang imigrasi yang hanya mengurus paspor saja adalah keliru. Hal ini dikarenakan kantor imigrasi juga melakukan pengawasan orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semboyan “Bhumi Pura Wira Wibawa” yang berarti Penjaga Pintu Gerbang yang Berwibawa, hal ini menandai bahwasanya Imigrasi memiliki peran penting dalam menjaga pintu gerbang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Imigrasi menjadi pihak yang berwenang untuk menilai apakah seseorang itu dianggap layak atau tidak untuk masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Disamping itu, Imigrasi juga berwenang untuk melakukan deportasi atau projustisia apabila warga negara asing dianggap telah melakukan pelanggaran keimigrasian.



Pada tahun 2019 saja, terdapat 22.833.307 warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia. Sedangkan pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 137 Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di seluruh Indonesia, 2.727 TIMPORA di seluruh Indonesia dan telah melakukan kegiatan bersama sebanyak 459 kegiatan.

Agustina, 2019



◀ Operasi Gabungan Timpora Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung

Untuk diketahui, bahwasanya jumlah kantor imigrasi yang ada di Indonesia sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) kantor Imigrasi. Sedangkan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km², dan dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah sebanyak 17.499 pulau. Tentu sangat sulit bagi kantor imigrasi dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian secara optimal.

Pada tahun 2019 saja, terdapat 22.833.307 warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia. Sedangkan pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 137 Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di seluruh Indonesia, 2.727 Timpora di seluruh Indonesia dan telah melakukan kegiatan bersama sebanyak 459 kegiatan. (Agustina, 2019)

Pada saat itu, dengan jumlah wna yang keluar masuk dan jumlah Timpora yang dimiliki oleh Ditjen Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh Unit Pelayanan Teknis Imigrasi telah memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi, penangkalan, pengenaan biaya beban, dan pembatalan izin tinggal sebanyak 6.933 kasus. Tentu jum-

lah tersebut masih sangat rendah mengingat jumlah warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia masih sangat banyak. Lantas langkah apa yang harus ditempuh oleh kantor imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing yang ada di Indonesia? (Agustina, 2019)

Dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing dan demi tegaknya kedaulatan negara, imigrasi tentu tidak dapat bekerja sendiri. Mereka harus berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder. Dalam teori perubahan ada istilah 'pentahelix', 'penta' adalah lima dan 'helix' adalah jalinan. Sehingga konsep pentahelix terdiri dari lima unsur kekuatan yang saling bekerjasama, yaitu unsur Pemerintah, Akademisi, Badan atau Pelaku Usaha, Masyarakat (Komunitas), dan Media. Dengan adanya konsep pentahelix, imigrasi dapat bersatu padu dan menjalin kerjasama serta berkomitmen dengan pihak lain dalam melakukan pengawasan orang asing di Indonesia.

Menurut (Soemaryani, 2016), pentahelix merupakan referensi dalam pengembangan sinergitas antara instansi untuk mencapai suatu tujuan.



▲
Rapat Koordinasi Timpora
Provinsi Lampung Tahun 2022

1. Unsur Pemerintah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi keimigrasian, imigrasi bekerjasama dengan lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan orang asing di tiap-tiap wilayah kerja kantor imigrasi. Kegiatan kerjasama ini dikenal dengan nama Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing). Hal ini telah diatur dalam pasal 69 ayat 1, UU No.6 Tahun 2011 ttg Keimigrasian : Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing (Timpora) yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.

Dengan dibentuknya Timpora di setiap daerah, diharapkan kantor imigrasi bersama badan atau instansi pemerintah terkait dapat mengoptimalkan kegiatan pengawasan orang asing yang berada dalam wilayah kerjanya. Tentunya kegiatan pengawasan orang asing tersebut telah diatur dalam pasal 70 ayat 1 , UU No. 6 Tahun 2011 ttg Keimigrasian:

- a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
- b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- c. pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan

- d. pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.



Dengan dibentuknya timpora dan adanya kejelasan kegiatan yang dilakukan oleh Timpora, imigrasi diharapkan dapat bekerja secara optimal mengingat seluruh stakeholder yang terkait dengan kegiatan orang asing di Indonesia telah menjadi satu kesatuan tim yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan orang asing yang ada di Indonesia.

Agustina, 2019

2. Unsur Akademisi

Didalam melaksanakan pengawasan orang asing, tentunya unsur akademisi juga perlu dilibatkan. Hal ini mengingat banyaknya warga negara asing yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Indonesia. Dalam prosesnya, untuk mengenyam pendidikan di Indonesia, mahasiswa asing harus memiliki izin tinggal terbatas. Untuk mendapatkan izin tersebut, mahasiswa asing harus memiliki sponsor atau penjamin, yaitu pihak Perguruan Tinggi.

Sedangkan selaku penjamin mereka harus bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing tersebut selama tinggal di Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian dan perubahan alamat. (Pasal 63 ayat 2, UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian). Karena apabila mereka tidak dapat memenuhi jaminan yang diberikan, mereka dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 118, UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian)

Oleh sebab itu, unsur akademisi harus dilibatkan dan difasilitasi sehingga mereka dapat dengan mudah memberikan data dan keterangan untuk turut serta membantu Imigrasi dalam melakukan pengawasan mahasiswa asing baik keberadaannya maupun kegiatan yang mereka lakukan. Disamping itu, mereka juga dapat terhindar dari ancaman pidana yang menanti apabila lalai dalam memenuhi jaminan yang diberikan.

3. Unsur Badan/Pelaku Usaha

Warga negara asing yang datang ke Indonesia biasanya bertujuan untuk bekerja ataupun berlibur. Tentunya mereka membutuhkan tempat tinggal, baik itu di hotel, mess perusahaan, villa, guest house, rumah kontrakan dan sebagainya. Oleh sebab itu, unsur badan/pelaku usaha juga perlu dilibatkan dalam rangka pengawasan orang asing yang ada di Indonesia.

Untuk Pemilik/Pengurus tempat penginapan, mereka diwajibkan untuk memberikan



▲
Koordinasi Timpora Tingkat Provinsi Lampung melibatkan seluruh stakeholder yang terkait

data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapan atau tempat tinggalnya. Direktorat Jenderal Imigrasi meminta Pemilik/Pengurus tempat penginapan tersebut melaporkan setiap orang asing yang menginap melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak orang asing tersebut mulai menginap.

Dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing ini, yang dimaksud dengan 'tempat penginapan' antara lain hotel, apartemen, mess perusahaan, losmen, guest house, villa, tempat kos, rumah kontrakan, dan jenis penginapan lainnya yang bersifat komersil atau merupakan fasilitas akomodasi milik perusahaan.

Kewajiban untuk melaporkan orang asing ini tertera dalam Pasal 72 ayat 2, UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: "Pemilik atau pengurus

tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas."

Dan apabila pemilik penginapan tidak melaporkan hal tersebut kedalam APOA, maka akan ada ancaman pidana atau denda yang menanti mereka didepan. Hal ini secara jelas tertulis dalam Pasal 117, UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

"Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

juta rupiah)."

Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya keterlibatan dari unsur Badan/Pelaku Usaha, orang asing yang melakukan kegiatan liburan ataupun bekerja tetap dapat terpantau oleh imigrasi. Sehingga mengurangi resiko pelanggaran yang akan dilakukan oleh orang asing, apabila mereka selalu terpantau oleh petugas.

4. Masyarakat

Permasalahan tentang Pengawasan Orang Asing tidak hanya dilakukan oleh institusi atau lembaga negara saja. Masyarakat wajib ikut ambil bagian dalam hal pengawasan orang asing di lingkungannya. Sebab hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional, dimana didalam kepentingan tersebut ada juga kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat dapat melaporkan orang



▲ Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputranto menyampaikan laporan kegiatan Rakor Timpora

asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 35 ayat (3) huruf (a), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi "Masyarakat dapat melakukan aduan atau menyampaikan laporan sebagai bentuk pengawasan". Dengan adanya aduan dari masyarakat tersebut, pejabat imigrasi atau tim pengawasan orang asing dapat melakukan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian di wilayah kerja masing-masing. Bahkan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf (a), UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian juga tertulis tentang pejabat imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan Pengamanan Keimigrasian setelah

mereka mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah. Oleh sebab itu, laporan dari masyarakat sangat diperlukan oleh petugas imigrasi. Sebab hal tersebut merupakan pertanda bahwa masyarakat peduli dan mau bersinergi dengan pemerintah dalam hal pengawasan keimigrasian di Indonesia.

Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat melaporkan setiap orang asing yang menginap atau bertempat tinggal dirumahnya. Hal ini diatur dalam Pasal 72 ayat 1, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan.

5. Media

Media massa dan media sosial merupakan salah satu layanan publik yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya bagi imigrasi. Sebab dua hal ini telah menjadi alat utama masyarakat dalam mendapatkan beragam informasi yang dibutuhkan secara tepat dan akurat. Selain itu, media massa dan media sosial juga dapat menjadi katalisator dalam penyebaran informasi terutama hal-hal yang berkaitan dengan keimigrasian.

Banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari dua hal ini. Misalnya ketika salah satu perusahaan atau tempat hiburan mengadakan kegiatan pesta dan mengundang orang asing baik sebagai DJ, Koki, Konsultan, Pengajar, dan sebagainya. Biasanya mereka akan mempublikasikan kegiatan tersebut di media massa atau media sosial. Jadi ketika mereka lupa atau sengaja melupa untuk tidak melapor pada kantor imigrasi, maka petugas imigrasi tetap dapat memperoleh informasi tersebut dari berbagai media massa ataupun media sosial yang beredar ditengah masyarakat.

Terkadang petugas imigrasi juga mendapatkan informasi dari para jurnalis mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh orang asing di daerah. Oleh sebab itu, dirasa penting untuk memasukkan komponen media massa dan sosial media sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam hal pengawasan keimigrasian di Indonesia. Media massa dan media sosial kini telah menjadi salah satu alat control dalam melakukan pengawasan keimigrasian di Indonesia. •



7 KARAKTER PRIBADI AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN KEAGUNGAN ORGANISASI

1. Bekerja dan berkarya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT dan rakyat
2. Meyakini selalu diawasi Allah SWT dan menyadari bahwa jika berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan dan berbuat buruk pasti dibalas keburukan
3. Semangat belajar tiada akhir dan menciptakan beragam inovasi untuk kemudahan layanan
4. Hidup sederhana dengan *take home pay* yang halal
5. Mengeliminasi keserakahan terhadap kekuasaan dan harta
6. Merespon semua keberhasilan dengan syukur dan rendah hati
7. Menyikapi kegagalan dengan berfikir positif tentang hikmah sembari mencari solusi tepat



RAZILU

INSPEKTUR JENDERAL KEMENKUMHAM RI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG



Keluarga Besar
Kanwil Kemenkumham Lampung
mengucapkan

*Marhaban ya
Ramadhan*

**Selamat Menunaikan
Ibadah Puasa 1443 H**

Semoga Ibadah Kita Diberikan
Kelancaran dan Kemudahan
oleh Allah SWT

